

**KEBIJAKAN IMIGRASI ERA JOE BIDEN
DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

UZLATUNNISA

21323114

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**KEBIJAKAN IMIGRASI ERA JOE BIDEN
DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

UZLATUNNISA

21323114

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden di Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko Tahun 2021-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 4 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

This block contains three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is 'Masitoh', the second is 'Elyana', and the third is 'Karina'. The fourth member of the board, 'Hasbi Aswar', is listed in the list but has no signature shown.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025



UZLATUNNISA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 KEBIJAKAN IMIGRASI ERA JOE BIDEN DAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL SERTA <i>SOCIAL STRUCTURE AND BEHAVIOR</i> DENGAN KERANGKA- <i>DECISION MAKING THEORY</i> OLEH RICHARD SNYDER	17
2.1 Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden	17
2.2 Analisis Faktor Internal Berdasarkan <i>Decision Making Theory</i> Richard Snyder	25
2.2.1 Faktor <i>Non-Human Environment</i> Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden	26
2.2.2 Faktor <i>Society</i> Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden	30
2.2.3 Faktor <i>Human Environment</i> Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden	35

2.3 Analisis Faktor <i>Social Structure and Behavior</i> Berdasarkan Decision Making Theory Richard Snyder	39
BAB 3 ANALISIS <i>DECISION MAKING PROCESS, ACTION</i>, DAN <i>FAKTOR EXTERNAL</i> BERDASARKAN <i>DECISION-MAKING THEORY</i> RICHARD SNYDER	43
3.1 Implementasi <i>Decision Making Process-Decision Makers</i> dalam Konteks Kebijakan Imigrasi Joe Biden	44
3.2. Faktor Eksternal Dalam Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden	49
3.2.1 Faktor Non-Human Environment Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden	50
3.2.2 Faktor <i>Societies Organized and Functioning as States and Government</i> Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden	52
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Decision Making Theory Richard Snyder.....	10
---	----

DAFTAR SINGKATAN

ACA	: Affordable Care Act
AS	: Amerika Serikat
CDC	: Center for Diseases Center
CSM	: Center for Migration Studies
DACA	: Deferred Action for Childhood Arrivals
DHS	: Department of Homeland Security
DOJ	: Department of Justice
PDT	: El Paso Del Norte Processing Center
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOM	: International Organization for Migration
MPP	: Migrant Protection Protocol
OKI	: Organisasi Kerjasama Islam
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UWD	: United We Dream
UNODC	: United Nations on Drugs and Crime

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pembahasan terbentuknya kebijakan imigrasi Amerika Serikat di perbatasan AS-Meksiko era Joe Biden periode 2021-2022, permasalahan utama yang diangkat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Joe Biden pada pembentukan kebijakan imigran di perbatasan AS-Meksiko. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan konsep teori pengambil keputusan menurut Richard Snyder yang berfokus pada faktor internal, *social structur and behavior*, dan eksternal. Perubahan kebijakan dipengaruhi oleh, variabel internal menjawab faktor dari kondisi Letak Geografis dan Ekonomi (*Non-Human Environment*), desakan dan protes dari masyarakat domestik dan kelompok pro imigran (*Society*), dan pengaruh ideologi Partai Demokrat dan Ideo Karakteristik Joe Biden (*Human Environment*), pada faktor *social structure and behavior* faktor dari nilai kebebasan bangsa AS (*Major Common Value Orientations*) dan faktor eksternal mencakup pada tekanan dari organisasi internasional, negara lain, dan kerja sama regional (*Faktor Societies Organized and Functioning as States and Government*). Berdasarkan temuan penelitian ini, arah kebijakan imigrasi era Joe Biden lebih bersifat humanis, kolaboratif, dan inklusif terhadap imigran di perbatasan. Penelitian ini juga mencerminkan dinamika internal, *Social Structure and Behavior*, dan eksternal memainkan peran penting dalam memengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi di perbatasan AS-Meksiko era Joe Biden.

Kata-kata kunci: Kebijakan imigrasi, Amerika Serikat, Meksiko, Joe Biden, Imigran Meksiko

ABSTRACT

This research focuses on discussing the formation of the United States immigration policy at the US-Mexico border in the Joe Biden era for the 2021-2022 period, the main problem raised is the factors that influence Joe Biden on the formation of immigrant policies at the US-Mexico border. To answer this research question, we use the concept of decision-making theory according to Richard Snyder, which focuses on internal, social structure and behaviour, and external factors. Policy changes are influenced by, internal variables answering factors from the conditions of the Geographical and Economic Location (*Non-Human Environment*), pressure and protests from domestic communities and pro-immigrant groups (*Society*), and the influence of the ideology of the Democratic Party and Joe Biden's Ideo Characteristics (*Human Environment*), on social structure and behaviour factors from the value of freedom of the US nation (*Major Common Value Orientations*) and external factors include pressure from international organisations, other countries, and regional cooperation (*Societies Organised and Functioning as States and Government factors*). Based on the findings of this research, the direction of Joe Biden's immigration policy is more humanist, collaborative, and inclusive towards immigrants at the border. This research also reflects that internal, *Social Structure and Behaviour*, and external dynamics play an important role in influencing the formation of immigration policy at the US-Mexico border in the Joe Biden era.

Keywords: Immigration policy, United States, Mexico, Joe Biden, Mexican immigrants

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Imigran merupakan sebuah isu yang menimbulkan polarisasi dalam politik Amerika Serikat (AS), kasus imigran memainkan peran penting pada setiap pemilihan presiden AS. Hal tersebut dapat dibuktikan pada gagasan yang terdapat pada buku "*A Nations of Immigrants*" yang ditulis oleh John F. Kennedy pada tahun 1958, dimana dalam buku tersebut memberikan gagasan bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan berpenduduk yang sebagian besarnya terdiri dari para imigran dan keturunan mereka. Sejak pendatang pertama, imigran telah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk AS di berbagai bidang, termasuk politik dan sosial yang membantu AS menjadi negara bangsa (Taufik and Pratiwi 2021,223). Dalam bidang ekonomi seperti mereka mampu menjadi pembuka dengan penjualan sebesar 63 miliar dolar. Hingga pada bidang inovasi, imigran telah berkontribusi sekitar 25% dari pendirian Perusahaan baru pada bidang *High Technology* periode tahun 2006-2012 (Alamari 2020).

Imigran tidak hanya memberikan kontribusi terhadap AS akan tetapi disisi lain imigran memberikan dampak permasalahan yang harus dihadapi oleh AS. Imigran menjadi sebuah ancaman bagi AS, mereka menganggap bahwa imigran telah merugikan ekonomi negara dengan membebani negara, menjadi penjahat bagi penduduk Amerika seperti merebut pekerjaan, dan terjadinya penyelundupan *undocumented immigrant*, penyelundupan *undocumented immigrant* ini banyak terjadi di perbatasan wilayah AS-Meksiko. Permasalahan penyelundupan

undocumented immigrant dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan transnasional yang terjadi dalam hubungan internasional (Nainggolan 2010). Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, penyelundupan imigran merupakan sebuah masalah global dengan cara ilegal demi keuntungan finansial atau materi lainnya yang disebabkan oleh masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara yang dimana migran tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk asli, Sedangkan *undocumented immigrant* adalah perpindahan penduduk yang tidak memiliki persyaratan-persyaratan yang sah untuk melakukan migrasi secara legal United Nations Office on Drugs and Crimes ((UNODC). *Smuggling of Migrants: The harsh search for a better life. n.d.*).

Dalam catatannya Miriam Jordan terdapat sebanyak 178.622 jiwa imigran yang diterima oleh Amerika Serikat pada bulan April 2021, dan AS telah menghentikan *undocumented immigrant* sebanyak 160 jiwa lebih dari negara di perbatasan AS-Meksiko. *undocumented immigrant* sangat memberikan dampak permasalahan bagi AS, terutama pada permasalahan pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya terjadi terorisme yang dilakukan oleh non-negara, pengedar obat-obatan yang terlarang, hingga perdagangan manusia yang akan berkembang di AS. Secara ekonomi permasalahan yang akan ditimbulkan dari *undocumented immigrant*, AS akan mengalami kerugian dengan biaya yang cukup besar seperti para *undocumented immigrant* tidak membayar pajak hingga memulangkan para *undocumented immigrant* tersebut ke negara asalnya. Imigran memberikan kerugian bagi penduduk asli seperti berkurangnya aktivitas perekonomian bagi penduduk asli AS, Hal tersebut

disebabkan terjadinya persaingan antara masyarakat asli dengan imigran untuk mendapatkan lapangan pekerjaan (Taufik and Pratiwi 2021,223).

Sebagian besar populasi *undocumented immigrant* di Amerika Serikat berasal dari wilayah Amerika Latin seperti Meksiko yang menyumbang sekitar 60% dan sisanya dari berbagai negara lainnya (Triputri 2016). Menurut penemuan *Pew Research Center* 2024, populasi *undocumented immigrant* di Amerika Serikat telah mencapai 10,5 juta jiwa pada tahun 2021 dan meningkat sebanyak 11.0 juta jiwa di tahun 2022 (Butler 2024). *undocumented immigrant* tersebut menggunakan jalur utara untuk menuju Amerika Utara terutama menuju Amerika Serikat. Beberapa imigran lainnya bergabung dengan penyelundupan imigran dari berbagai negara seperti Amerika Selatan, Timur Tengah, Asia, Karibia, dan Afrika (United Nations Office on Drugs and Crime 2018).

Undocumented immigrant yang melintasi perbatasan AS-Meksiko sering kali bergantung pada jasa penyelundupan untuk membantu mereka. Jasa penyelundupan memiliki jalur yang terus berubah di wilayah perbatasan Meksiko sehingga sulit diawasi oleh pihak keamanan. Setiap tahunnya, dengan jumlah besar pendatang asing, terutama dari Meksiko memasuki wilayah AS menggunakan visa yang terbatas sebagai non-imigran. Meskipun menggunakan visa terbatas seharusnya dapat membatasi jumlah pendatang, tetapi banyak dari mereka tidak kembali ke negara asal sehingga Departemen Imigrasi AS kesulitan menangani masalah ini secara efektif (Triputri 2016,13).

Undocumented immigrant telah melanggar peraturan imigrasi Amerika Serikat yang tercantum dalam *Title 8 United States Code Section 1325* yang berkaitan dengan *Improper Entry by Alien*. Disebutkan dalam Hukum tersebut

bahwa siapapun itu yang bukan warga negara Amerika Serikat mencoba untuk memasuki wilayah AS menggunakan jalur migrasi legal untuk menghindari pemeriksaan oleh pihak berwenang imigrasi, ataupun mencoba memasuki wilayah dengan menggunakan dokumen palsu dan menyembunyikan identitas asli maka akan dikenakan sanksi hukuman. Sanksi tersebut biasanya berupa denda ataupun hukuman penjara dengan durasi lebih dari 6 bulan, jika pelanggaran tersebut diulang maka sanksi dapat dikenakan denda atau hukuman penjara selama 2 tahun lebih atau dapat keduanya (Robertson 2010).

Pemerintah Amerika Serikat telah menuntut kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan *undocumented immigrant*, akan tetapi setiap pemerintahan yang berkuasa kebijakan yang dihasilkan memiliki perbedaan. Hal tersebut dipengaruhi karena kebijakan luar negeri yang telah dibuat oleh Amerika Serikat akan selalu berganti sesuai pergantian masa kepresidenan (Taufik and Pratiwi 2021, 225). Setiap kebijakan yang diterapkan selalu berdasarkan pada kepemimpinan negara yang berkuasa dan kondisi Amerika Serikat pada masanya. Kebijakan yang diambil akan selalu berbeda dalam segala hal yang berkaitan dengan keamanan penduduk asli Amerika Serikat maupun kebijakan perlindungan terhadap *undocumented immigrant* di wilayah perbatasan Meksiko.

Pada tahun 2021, merupakan awal masa jabatan Joe Biden sebagai presiden AS, Biden mengambil langkah konkret untuk mengubah kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh presiden sebelumnya, yakni Donald Trump (Krogstand and Barrera 2022). Pada masa kepemimpinan Joe Biden dimulai, Biden dengan cepat mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperbaiki atau meninjau ulang kebijakan luar negeri termasuk kebijakan imigran salah satunya yang diberlakukan

oleh pemerintahan Donald J. Trump. Pada pemerintahan Joe Biden mengimplementasikan kebijakan dengan menekan angka permasalahan *undocumented immigrant* seperti menekankan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan perlindungan dengan mendorong sebuah proses penyatuan kembali keluarga imigran dan memberikan bantuan bagi para imigran yang membutuhkan. Sedangkan pada kepemimpinan presiden Donald Trump mengimplementasikan kebijakan *migrant protection protocol*, *family separation*, *zero tolerance*, memberlakukan visa secara ketat pada awal tahun 2018, dan membangun tembok perbatasan (Kusnady and Audry 2020).

Kebijakan yang diimplementasikan oleh Biden menggunakan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif seperti salah satunya menyatukan kembali keluarga imigran yang sebelumnya terpisahkan oleh kebijakan pemisahan keluarga yang diimplementasikan oleh Trump. Hal tersebut karena berkaitan dengan kebijakan yang sebelumnya diimplementasikan oleh Trump yang mana lebih berfokus terhadap penegakan hukum yang keras dan berujung pada ketidakadilan HAM seperti terjadinya kekerasan struktural yang disebabkan oleh implementasi kebijakan *Zero Tolerance*. Kebijakan yang diimplementasikan oleh Trump mendapat kritik luas dari banyak orang di AS hingga mendapatkan protes dari tingkat internasional yang dinilai bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh Trump melanggar HAM, hal tersebut yang memengaruhi Joe Biden untuk tidak melanjutkan kebijakan imigran era Trump. Oleh karena itu, Penelitian ini akan menganalisis faktor yang memengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi di era kepemimpinan Presiden Joe Biden, khususnya terkait dengan penanganan isu

undocumented immigrant di perbatasan AS-Meksiko periode tahun 2021 hingga 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi di era Joe Biden pada kasus *undocumented immigrant* di perbatasan AS-Meksiko tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis serta memahami kebijakan-kebijakan imigrasi yang diimplementasikan pada era Joe Biden.
2. Melihat bagaimana masyarakat Amerika Serikat memandang dan merespons para imigran Meksiko dan kebijakan imigran sehingga terjadi perubahan kebijakan imigrasi era Joe Biden.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan penelitian agar cakupan pada pembahasan tidak terlalu luas. Penulis menetapkan batasan untuk penelitian ini pada periode tahun 2021 hingga 2022. Penetapan Batasan dari tahun 2021 merupakan masa pemilihan presiden di Amerika Serikat dan terpilihnya Joe Biden sebagai kandidat presiden selanjutnya, dan pada tahun 2021 juga merupakan masa perumusan kebijakan yang akan diimplementasikan setelah dilantiknya Joe Biden

sebagai presiden AS. Tahun 2021 merupakan penetapan kebijakan imigrasi yang akan dianalisis, dan juga merupakan tahun pertama Joe Biden resmi dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, tepatnya pada 20 Januari 2021. Penetapan batasan hingga tahun 2022 merupakan tahun penetapan kebijakan imigran Joe Biden. Fokus penelitian ini adalah memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya arah kebijakan imigrasi era Joe Biden di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi yang akan dijadikan sebagai bahan acuan penelitian. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu Jurnal yang berjudul *Securitizing the Unseen: Behind Trump's Reliance on Mexico in Combating Irregular Immigration* yang ditulis oleh Eiga Sitompul dan Bambang Cipto. Jurnal ini menganalisis mengenai alasan di balik keputusan Presiden Trump untuk menekan Meksiko dalam upaya mengendalikan imigrasi ilegal ke AS. Meskipun Donald Trump menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam melakukan reorientasi mekanisme pengendalian imigrasi di dalam negeri, akan tetapi Trump tetap bergantung pada otoritas Meksiko dalam tujuan sekuritisasi. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas migrasi secara besar-besaran yang berada di perbatasan AS-Meksiko dan mendorong Trump untuk memaksa Meksiko bekerja sama mengurangi arus imigran ke AS (Sitompul and Cipto 2023, 328-340).

Tinjauan pustaka yang kedua yaitu Jurnal yang berjudul "*American First: Kebijakan Donald Trump Dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat*" yang ditulis oleh Taufik dan Sundari Ayu. Jurnal ini mengkaji strategi *selective isolationism* yang digunakan oleh Trump dalam kebijakan pembatasan imigran ke

Amerika Serikat, yang dikenal dengan slogan kampanyenya "*America First*". Trump mengadopsi doktrin "*American First*" mengarah pada nasionalisme, anti imigran, dan anti-muslim. Kebijakan "*American First*" dianggap sebagai langkah *grand strategy* AS di bawah pemerintahan Trump untuk mengatasi permasalahan di masyarakat. Trump menafsirkan isu ekonomi, sosial, dan imigrasi secara sempit dengan dalih keamanan nasional, mendorong kebijakan yang berorientasi pada urusan domestik dan membatasi keterlibatan internasional. Strategi selective isolationism berdampak pada pembatasan imigran masuk ke AS. Doktrin "*American First*" dianggap kontradiktif dengan keberadaan kaum imigran yang telah membangun perekonomian AS, serta mempertajam jurang pemisah antara kulit putih dan kulit hitam. Akibatnya, doktrin ini tidak populer di sebagian masyarakat AS dan internasional, terlihat dari pelantikan Trump yang tidak seramai dahulu dan adanya dua kali percobaan pemakzulan. Strategi ini juga berdampak pada ketidakpastian ekonomi global karena pembatasan kerja sama (Taufik and Pratiwi 2021, 222-238).

Tinjauan Pustaka yang ketiga penulis menggunakan Jurnal yang berjudul "Imigran dan Warga Keturunan Jepang di Amerika Serikat: Sentimen-Sentimen Terhadapnya Dulu dan Kini" yang ditulis oleh Rifka Pratama. Jurnal ini membahas sejarah sentimen rasial dan diskriminasi yang telah dialami oleh imigran dan warga keturunan Jepang di Amerika. Pasca pemberlakuan *Chinese Exclusion Act 1882*, imigran Asia termasuk Jepang mengalami berbagai tindakan kekerasan verbal, fisik, dan diskriminasi. Hal tersebut berlanjut pada Covid-19 dan menjadi pemicu munculnya sentimen anti-Asia dengan tuduhan warga keturunan Asia sebagai pembawa virus. Jurnal ini juga membahas perbedaan pemicu sentimen anti-Jepang

di masa lalu mengenai kesempatan kerja dan kecurigaan politik seperti penyebaran informasi palsu, prasangka dan diskriminasi yang rasial, peran tokoh publik, dan kebijakan pemerintah (Pratama 2021, 63-71).

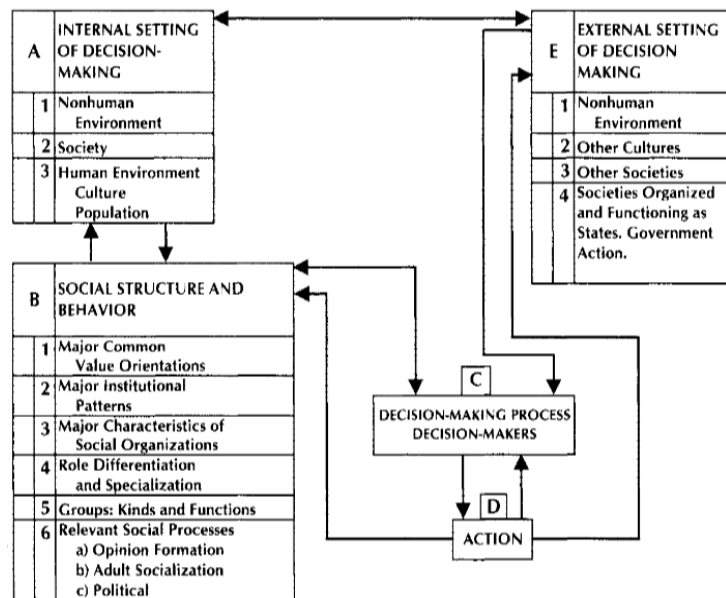
Tinjauan Pustaka yang keempat yaitu Jurnal yang berjudul “*An Overview and Critique of US Immigration and Asylum Policies in the Trump Era*” yang ditulis oleh Paul Wickham Schmidt. Jurnal ini membahas mengenai kebijakan imigrasi dan suaka di era Donald Trump, dimana terjadinya perubahan yang drastis pada kebijakan imigrasi. Perubahan tersebut dimulai dari membatasi hak-hak para imigran dan pencari suaka, hingga pemisah keluarga yang dipicu oleh program kebijakan *Zero Tolerance*. Kebijakan tersebut menimbulkan sebuah ketidakpastian terhadap hukum dan berdampak pada kemanusiaan yang serius. Jurnal tersebut juga berisi kritik terhadap kebijakan yang menimbulkan penderitaan, dan mengabaikan prinsip *Due Process* (Schmidt 2019, 92-100).

Tinjauan pustaka yang dipilih penulis, yang telah diulas pada penulis sebelumnya memberikan titik kesamaan terhadap kebijakan imigrasi di AS. Adapun perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut yaitu, penelitian pertama hanya membahas arah kebijakan imigrasi era Donald Trump, Kedua hanya menyoroti kebijakan “*American First*” yang merupakan bentuk pembatasan imigrasi era Donald Trump, penelitian ke tiga memberikan gambaran terhadap isu imigran Jepang di AS yang memunculkan sentimen anti-Asia, dan penelitian keempat membahas perubahan kebijakan di era Donald Trump dan dampak kebijakannya terhadap imigran serta sistem hukum. Berbeda dengan keempat penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada pergeseran kebijakan imigrasi dari era Donald Trump ke era Joe Biden.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori kerangka pemikiran *Decision Making* yang ditulis oleh Richard Snyder untuk menganalisis faktor yang memengaruhi terbentuknya arah kebijakan imigrasi yang diimplementasikan pada masa pemerintahan presiden Joe Biden terhadap kasus *undocumented immigrant* di perbatasan AS-Meksiko. *Decision Making Theory* yang ditulis oleh Richard Snyder dalam bukunya yang berjudul “*Foreign Policy Decision-Making*” menyatakan bahwa perilaku politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong proses pembentukan sebuah keputusan (Snyder, et al. 2002, 61-65).

Gambar 1 Decision Making Theory Richard Snyder



Sumber: Snyder et al. 2002

Melihat diagram di atas, Snyder menjelaskan bahwa faktor-faktor proses pembuatan kebijakan memiliki struktur yang kompleks dengan melibatkan 2 faktor

yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Faktor Internal (A) memiliki 3 elemen yaitu 1. *Non-Human Environment*, 2. *Society*, 3. *Human Environment* mencakup pada *Culture dan Population* dan saling berkaitan dengan *Social Structure and Behavior* (B) memiliki 6 indikator yaitu 1. *Major Common Value Orientation*, 2. *Major Institutional Patterns*, 3. *Major Characteristics of Social Organizations*, 4. *Role differentiations and Specialization*, 5. *Group: Kinds and Functions*, dan 6. *Relevant Social Process* > (a) *Opinion Formation*, (b) *Adult Socialization* dan (c) *Political* yang memberikan konteks dalam faktor internal dengan beberapa elemen yang dijelaskan pada diagram di atas. Faktor Eksternal (E) memiliki 4 elemen yaitu 1. *Non-Human environment*, 2. *Other Culture* 3. *Other Societies* dan 4. *Societies Organized and Functioning as States Government Actions*. Bagian C yang merupakan aktor pembuat keputusan sangat berperan sentral dalam proses pengambilan keputusan, dan proses ini seringkali melibatkan beberapa pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas terhadap keputusan yang menghasilkan Action (D). Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan pengaruh dari kedua faktor tersebut, keputusan tersebut akan bersifat efektif tergantung pada kemampuan para aktor untuk memahami dan merespons permasalahan yang ada (Snyder, et al. 2002, 62).

Snyder menjelaskan bahwa faktor internal dapat berupa opini publik, posisi geografis, sifat sistem politik, nilai-nilai dari masyarakat, partai politik, tekanan sikap dan moral kelompok. Variabel *Social Structure and Behavior* merupakan variabel yang tergabung dengan variabel *Internal Setting*, Snyder menjelaskan bahwa variabel *Social Structure and Behavior* dengan variabel *Internal Setting* saling berkaitan. Hal tersebut dikarenakan mencakup pada nilai, ciri-ciri psikologis

dan ciri-ciri sosiologis yang berlaku di masyarakat yang kemudian dapat mempengaruhi aktor pengambil keputusan (Snyder, et al. 2002, 98-99).

Menurut Snyder, dalam variabel *Social Structure and Behavior* terdapat 6 elemen yang dapat melihat faktor yang mempengaruhi *Decision Maker* menentukan keputusannya (Snyder, et al. 2002, 64). Akan tetapi pada variabel ini penulis hanya menggunakan 3 elemen saja yang dapat digunakan yaitu *Major Common Value Orientations*, *Major Institutional Patterns*, dan *Role Differentiation and Specialization* dan pada 3 elemen lainnya yaitu *Major Characteristic of Social Organization*, *Groups: Kind and Functions* dan *Relevant Social Process a.) Opinion Formation*, *b.) Adult Socialization*, *c.) Political* tidak ditemukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi era Joe Biden sehingga elemen tersebut tidak dapat digunakan.

Di sisi lain, faktor *external* juga berperan seperti tindakan ataupun reaksi dari negara lain maupun itu dari perilaku unit, Masyarakat, organisasi, lingkungan dan budaya. Dengan kata lain mempertimbangkan dari berbagai elemen, baik itu dari dalam negeri maupun lingkungan internasional (Snyder, et al. 2002, 63-65). Pada faktor eksternal terdapat 4 elemen, akan tetapi dalam variabel ini penulis hanya menggunakan 2 elemen saja yang dapat digunakan karena relevan yaitu *Non-Human Environment*, dan *Societies Organized and Functioning as States* *Government Action* dan 2 elemen lainnya yaitu, *Other Cultures*, dan *Other Societies* tidak dapat digunakan karena tidak ditemukan bahwa faktor tersebut mempengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi era Joe Biden.

Richard Snyder menekankan bahwa inti dari *process decision making* adalah rencana dan tujuan. Keputusan itu berasal dari niat dan tujuan dari pembuat

keputusan dimana secara aktif memilih lalu menafsirkan informasi atau input yang relevan. Selanjutnya menyusunnya ke dalam situasi yang memungkinkan, dan pembuat keputusan akan menentukan tindakan mana yang akan diambil. Sehingga menurut Snyder, bahwa keputusan itu dirancang dan dipikirkan secara terencana (Steiner 1997, 392).

Penulis menggunakan *Decision Making Theory* karena teori ini relevan, dimana teori ini melihat pembuat keputusan dipengaruhi oleh faktor *internal, social structure and behavior* dan *external*, mengenai kebijakan imigrasi era Biden dipengaruhi oleh isu *dynamics* politik domestik dengan kemenangan Partai Demokrat yang cenderung pro terhadap imigran dan HAM. Selain itu terjadinya protes dari aktivis dan masyarakat yang tidak setuju dengan pengimplementasian atas kebijakan *Zero Tolerance* yang menjadikan *internal pressure* bagi Biden untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif. Sebagai pembuat keputusan isu *internal* yang ada, jika dilihat dari *Decision Making Theory* yang dicetuskan oleh Snyder, Biden dapat menggunakan kebijakan yang bertentangan dengan HAM dan protes serta sentimen publik akan menjadi input yang penting upaya merancang perubahan kebijakan yang akan lebih berorientasi.

Kebijakan imigrasi yang diimplementasikan era Trump mendapat kritik luas dari banyak negara tetangga maupun organisasi internasional, karena dianggap telah melanggar HAM. Hal tersebut dapat menjadi input yang digunakan Biden untuk merespon faktor-faktor pendorong arah kebijakan. Dinamika regional yang berada di AS seperti yang ditekankan oleh Snyder bahwa input merupakan area yang penting untuk diteliti. Proses keputusan yang terencana, dan faktor *internal*

social structure and behavior maupun *external* dipertimbangkan untuk menciptakan tujuan yang lebih inklusif.

1.7 Argumen Sementara

Perkembangan kebijakan imigrasi pada era Joe Biden pada kasus *undocumented immigrant* di perbatasan AS-Meksiko dapat dijelaskan melalui pendekatan *Decision Making Theory*. Argumen Sementara jika penelitian ini dianalisis menggunakan *Decision Making Theory*, Maka pengambil keputusan adalah pemerintah AS yang harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti faktor internal dengan indikator *Non-Human Environment, Society, dan Human Environment* dan faktor eksternal mencakup indikator *Societies Organized and Functioning as States and Government* dalam menentukan kebijakan imigrasi yang tepat. Penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai kebijakan yang telah dipertimbangkan oleh presiden Joe Biden. Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan pendekatan yang lebih terbuka dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, opini publik, ideologi politik, karakteristik Joe Biden, nilai yang di anut oleh bangsa AS, keputusan dari DPR dan senat di AS serta respon Organisasi Internasional dimana dapat lebih jelas melihat pengambilan keputusan dalam konteks yang kompleks.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang

mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk non-numerik, seperti deskripsi verbal, observasi, atau analisis dokumen. Pendekatan ini tidak menggunakan teknik statistik atau pengukuran kuantitatif dalam proses analisisnya (Rukminingsih, Adnan, and Latief 2020).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu, Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Objek penelitian ini adalah perubahan kebijakan imigrasi yang di implementasikan Presiden Joe Biden khususnya terkait penanganan imigran di perbatasan AS-Meksiko.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, artikel berita terpercaya, dan publikasi terkait.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian akan melakukan tinjauan komprehensif atas terbentuknya kebijakan imigrasi di era kepemimpinan Joe Biden. Dengan analisis dari studi-studi terdahulu tentang *undocumented immigrant* di perbatasan AS-Meksiko akan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi. Dengan data-data yang sudah didapatkan, penulis akan menyajikan data dalam bentuk narasi sesuai dengan subbab yang relevan. Selanjutnya, penulis akan memberikan kesimpulan terhadap data-data.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 akan menjelaskan latar belakang permasalahan imigrasi ilegal di perbatasan AS-Meksiko. Rumusan masalah, Cakupan penelitian, Tujuan dan

manfaat dari penelitian, memaparkan teori yang digunakan, hingga metode penelitian.

Bab 2 akan membahas Kebijakan imigrasi era Joe Biden, dan Respon Domestik terhadap kebijakan imigrasi. Selain itu menganalisis faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan melalui variabel *internal setting* dan variabel *social structure and behavior* dalam teori *Decision Making Theory* Richard Snhyder.

Bab 3 pembahasan difokuskan terhadap menganalisis *Decision making* dan proses dari *decision making*, termasuk *Action* yang muncul sebagai tanggapan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan imigran di era pemerintahan Joe Biden serta membahas faktor dari variabel *external setting* dalam *Decision Making Theory* Snyder.

Bab 4 akan menyajikan kesimpulan dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, dan rekomendasi.

BAB 2

KEBIJAKAN IMIGRASI ERA JOE BIDEN DAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL SERTA *SOCIAL STRUCTURE AND BEHAVIOR* DENGAN KERANGKA-*DECISION MAKING THEORY* OLEH RICHARD SNYDER

Bab ini akan menyajikan 2 subbab untuk menjabarkan pendahuluan mengenai isu yang akan diteliti. Pertama, akan menjelaskan Kebijakan Imigran dan Arus Imigran asal Meksiko era Joe Biden. Pembahasan ini ditujukan untuk memahami kebijakan imigrasi di era Joe Biden, fokusnya terletak pada tujuan dan tantangan yang dihadapi dari kebijakan yang dibuat. Pada pemerintahan Joe Biden dikenal dengan pendekatan yang lebih *humanis* dengan memberikan perlindungan terhadap kelompok suaka atau imigran. Seperti meningkatkan penerimaan pengungsi hingga mempertahankan keringanan deportasi bagi para *undocumented immigrant* yang memasuki Amerika Serikat (Krogstand and Barrera 2022). Pembahasan tersebut akan menjadi pendukung dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini. Pada subbab kedua akan memberikan penjelasan rinci mengenai bagaimana faktor *internal setting* dan *social structure and behavior* dalam *Decision Making Theory* yang dikemukakan oleh Richard Snyder dapat berkaitan dalam analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan imigrasi era Joe Biden pada tahun 2021-2022.

2.1 Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden

Peralihan kepemimpinan di AS dari era Donald Trump ke era Joe Biden memberikan perubahan yang cukup signifikan pada kebijakan imigrasi. Setelah dilantiknya Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat, dengan cepat melakukan

pencabutan beberapa kebijakan terkait imigran pada masa pemerintahan Donald Trump. Pada hari pelantikannya, Joe Biden mengumumkan beberapa kebijakan yang dibuatnya secara signifikan diantaranya penghentian keadaan darurat nasional yang ada di perbatasan selatan, penghentian pada pembangunan tembok perbatasan dan melakukan pencabutan larangan perjalanan atau *Travel Ban* yang bersifat diskriminatif terhadap negara mayoritas muslim (*"Biden Administration Reverses Trump Administration Policies on Immigration and Asylum"* 2021).

Sejak masa kampanyenya Joe Biden menggunakan narasi imigrasi untuk menekankan pada perlindungan atas HAM dan memperkuat hubungan kerja sama untuk mengatasi akar penyebab imigran dengan negara-negara yang berada di Amerika Tengah (Verea 2022). Biden mengupayakan beberapa kebijakan Peningkatan Kapasitas Penerimaan para Imigran dengan mencabut kebijakan *Zero Tolerance* dan *Family Separation* pada 26 Januari 2021 oleh *Department of Justice* (DOJ). Biden menyatakan akan melakukan langkah reformasi terhadap sistem imigrasi yang bertujuan untuk mengupayakan hak imigran untuk tetap bersama keluarga tanpa pemisah, dan berpendapat dalam penyelesaian masalah imigran bukan dengan konsep hukuman kejam yang melanggar konsep kemanusiaan seperti kebijakan *Zero Tolerance and Family Separation*. Dimana kebijakan tersebut memisahkan anak-anak dengan orang tuanya pada saat proses penahanan, dan terjadinya kekerasan, pelecehan, hingga mengalami kecemasan dan trauma terhadap anak-anak (Dewi and Cahyani 2020, 34-35).

Tepatnya pada tanggal 2 Februari, Joe Biden membuat Peraturan Tugas untuk penyatuan kembali keluarga yang akan bekerja di AS, isi dari Peraturan Tugas tersebut yaitu:

1. Identifikasi anak-anak yang terpisah dari keluarganya di perbatasan AS-Meksiko sejak 20 Januari 2017 hingga 20 Januari 2021.
2. Memberikan fasilitas terhadap anak-anak yang teridentifikasi dengan keluarganya.
3. Diskusi dengan anak-anak, keluarga, perwakilan atau orang yang bersangkutan mengenai preferensi keluarga, hak-hak, dan kesejahteraan para anak-anak, dan.
4. Memberikan laporan berkala kepada Presiden, laporan perkembangan awal dalam jangka waktu 120 hari dan laporan sementara setiap 60 hari sekali.

Dalam Peraturan Tugas tersebut, diperkirakan sebanyak 1.000 keluarga yang masih terpisah (“President Biden's Executive Actions on Immigration” 2021).

Biden mengeluarkan memorandum pada 20 Januari 2021, mengarahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Jaksa Agung untuk melakukan tindakan menerapkan kembali program DACA yang sebelumnya berusaha untuk diakhiri oleh Donald Trump. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa DACA merupakan program yang sangat mempertimbangkan kemanusiaan dan program DACA tidak seharusnya menjadi prioritas dihilangkan. Sebelumnya pada November 2020 Hakim pengadilan distrik federal menyatakan bahwa memorandum yang membatasi DACA merupakan kebijakan yang ilegal karena

pejabat yang melakukan hal tersebut tidak memiliki hak wewenang yang sah. Tujuan Biden dari kebijakan ini untuk memberikan kesempatan bekerja, para penerima DACA dan mempertahankan para karyawan (“Biden Expands Immigration Protections to Undocumented Spouses and Streamlines Employment-Based Visas for DACA Recipients” 2024).

Pada 20 Januari 2021, Joe Biden melakukan pengumuman untuk Penghentian Konstruksi Tembok Perbatasan AS-Meksiko. Menurut Biden, pembangunan tembok tidak akan menghentikan kejahatan ataupun menghalangi para penjahat yang ingin mengeksploitasi perbatasan AS dan tidak akan mengatasi akar dari permasalahan imigran seperti kekerasan pada negara asal dan kemiskinan. Trump Wall hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan banyak memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat (Setiady and Muharjono 2024).

Biden berupaya untuk mengakhiri kebijakan Title 42 pada 23 Mei 2020 dan sempat mendapat tolakan dari hakim federal, mengakhiri kebijakan tersebut didukung *Centers for Diseases Center* CDC yang menilai bahwa kondisi masyarakat telah membaik dan telah tersedianya vaksin bagi para imigran. Biden melakukannya untuk memberlakukan sebuah sistem yang adil. Akan tetapi kebijakan Title 42 telah di akhiri oleh CDC pada bulan Maret mengenai anak dibawah umur dengan tanpa pendamping. Untuk langkah selanjutnya Biden

menerapkan Title 8 yaitu kebijakan imigrasi terbuka bagi pencari suaka memasuki AS dengan alasan kekerasan dari negara asal para imigran. Tetapi kebijakan tersebut dinilai serupa dengan kebijakan Trump, karena banyaknya para imigran yang harus menunggu di Meksiko hingga klaim suaka mereka diberlakukan. Imigran yang tidak memenuhi syarat untuk suaka tetap akan dideportasi atau mendapati hukuman termasuk hukuman pidana bagi mereka yang mencoba masuk tanpa izin berulang kali (Gramlich 2022).

Biden menghentikan kebijakan eksekutif order 13768 pada 20 Januari, kebijakan Trump yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum imigrasi di dalam negeri dan mengimplementasikan eksekutif order 13993 yang bertujuan untuk memprioritaskan penegakan hukum agar lebih fokus terhadap perlindungan hak-hak dari imigran (American Immigration Lawyers Association 2024). Pemerintahan Biden melakukan penghentian terhadap kebijakan *Remain in Mexico* sejak 2021, akan tetapi menghadapi tolakan dari negara bagian seperti Texas dan Missouri. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Biden sebagai pemerintah memiliki wewenang untuk menghentikan kebijakan MPP, kebijakan tersebut resmi diberhentikan pada tahun 2022 (Guerra 2022).

Pada tanggal 20 Januari 2021, Biden menyatakan dukungannya terhadap rancangan *Citizenship Act of 2021* yang bertujuan untuk memodernisasi sistem imigrasi dengan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan AS, melindungi para

imigran dari ancaman yang mengambil hak hidup mereka dan memberikan keadilan kepada imigran dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat. Dua anggota kongres yaitu Senator Bob Menendez dan Linda Sanchez memperkenalkan kebijakan tersebut ke dalam sidang kongres pada tanggal 18 Februari 2021 (“President Biden's Executive Actions on Immigration” 2021).

Sejak minggu pertama masa pemerintahan Joe Biden menjadi presiden AS, Biden mendapat banyak kritik dari Partai Republik dan beberapa anggota dari Partai Demokrat. Para pengkritik tersebut menganggap bahwa kebijakan perbatasan yang diambil oleh Joe Biden terlalu terbuka dan sama saja membuka AS untuk para penjahat masuk. Akan tetapi kritik tersebut sangat berlebihan, sebagian besar tujuan dari kebijakan imigrasi era Biden sama ketatnya dengan kebijakan di era Trump yaitu tetap di bawah hukum imigrasi AS, dimana hanya orang-orang tertentu yang dapat memasuki AS (Bier 2021).

Selain mendapat kritik dari partai dan beberapa anggota partai, banyak warga AS yang merespons dengan mendukung program kebijakan Biden. Mereka mendukung kebijakan yang memberikan jalan kewarganegaraan terhadap para *undocumented immigrant* yang menikah dengan warga negara AS. Mereka ada yang menyatakan bahwa kebijakan yang dibawa oleh Biden mencerminkan nilai-nilai dari bangsa negara AS yang mementikan keluarga. Kelompok advokasi

Immigration Hub menemukan sebanyak 71% pemilih dari tujuh bagian negara yang menjadi medan pertempuran pada pemilu mendukung atas izin tinggal pasangan di AS selama lebih dari 5 tahun (Tempo.Co; Jakarta 2024). Seorang dosen dan direktur klinik layanan imigrasi Maryland Carey Law yaitu Maureen Sweeney mengungkapkan semua hal yang telah dilakukan secara sepihak oleh Donald Trump, dapat dibatalkan juga secara sepihak seperti larangan masuknya imigran ke AS, dan sekiranya pembatasan terhadap pengungsi dapat diubah. Hal tersebut merupakan kewenangan sebagai presiden (VOA 2020).

Sebagian masyarakat AS khawatir yang didorong oleh Partai Republik terhadap perilaku kejahatan yang akan dilakukan oleh para imigran dikarenakan risiko tersebut meningkat dari 19% menjadi 32%. Sedangkan dari kalangan Partai Demokrat meyakini banyak manfaat yang dihasilkan oleh imigran terutama imigran legal terhadap AS, banyak perusahaan di Amerika mendapatkan keuntungan yang besar karena sebagian besar imigran memiliki keahlian yang khusus terutama pada bidang teknologi dan sains dan imigran legal sangat berkontribusi terkait nilai-nilai dan memperkaya budaya AS (Associated Press 2024).

Meningkatnya jumlah para imigran yang berusaha untuk memasuki wilayah AS di perbatasan AS-Meksiko pada era Joe Biden telah membebani sumber daya pemerintah. Menurut survei Pew Research 2024, mayoritas masyarakat AS total sebesar 78% di antaranya 45% mengatakan bahwa banyaknya imigran yang

memasuki AS melalui perbatasan AS-Meksiko merupakan sebuah krisis dan 32% mengatakan sebuah masalah besar. Selama beberapa tahun belakangan ini, banyak masyarakat AS mengungkapkan pandangan yang negatif terhadap pemerintah yang menangani situasi perbatasan, total sebanyak 80% masyarakat mengungkapkan pandangannya, sebesar 45% mengungkapkan pemerintah melakukan pekerjaan sangat buruk dan hanya sebesar 18% memiliki pandangan yang positif terhadap pemerintah dalam menangani situasi perbatasan AS-Meksiko. Masyarakat dari 2 koalisi partai di AS menyatakan ketidakpuasaan, sebanyak total 89% dari anggota Partai Republik menilai bahwa pemerintah melakukan pekerjaan dengan buruk dari total tersebut, sebanyak 73% mengungkapkan bahwa pemerintah melakukan pekerjaan yang sangat buruk dalam mengatasi masalah di perbatasan. 73% dari Partai Demokrat menilai negatif terhadap kinerja pemerintah (Pew Research Center 2024).

Meningkatnya imigran terjadi karena beberapa faktor, yakni faktor ekonomi menjadi salah satu faktor cukup besar atas keberadaan migrasi para penduduk Meksiko di AS (Schumacher et al. 2023). Hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan imigrasi, para imigran beranggapan ada peluang untuk mendapatkan status legal. Para *undocumented immigrant* memasuki AS melalui jalur terbuka di perbatasan wilayah Amerika Serikat, adanya perbatasan wilayah yang terbuka tersebut memudahkan para *undocumented immigrant* untuk memasuki AS secara

bebas bahkan tanpa kendaraan sekalipun, dan adanya pihak ketiga seperti para pelaku penyelundupan imigran (Sugiati 2022).

Biden memilih untuk mengubah arah kebijakan imigrasi dengan mengimplementasi kebijakan *Open Door Policy*. Terdapat beberapa faktor yang mendukung Joe Biden untuk membuka pintu bagi imigran sedangkan lonjakan arus *undocumented immigrant* terus meningkat yang akan dibahas pada subbab dan bab selanjutnya. Seharusnya Biden lebih fokus terhadap perlindungan di perbatasan dan pengelolaan arus imigran, akan tetapi terfokus pada perlindungan HAM dan juga reformasi pada sistem imigrasi dengan harapan dapat mengatasi masalah dengan mempertimpangkan semua aspek.

2.2 Analisis Faktor Internal Berdasarkan *Decision Making Theory* Richard Snyder

Melihat dari teori pemikiran *Decision Making Theory* yang dicetuskan oleh Richard Snyder bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan oleh setiap aktor tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, pasti sebuah keputusan tersebut memerlukan pertimbangan pemikiran yang mendalam. Menurut Richard Snyder proses aktor dalam pengambilan keputusan pada suatu kebijakan pasti ada kaitannya dengan sebuah dorongan yang menjadi faktor terbentuknya sebuah kebijakan. Pada penelitian ini faktor pertama yang dapat dilihat yaitu *Internal Setting*, Faktor ini dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat pada setiap aktor yang sedang mengambil suatu keputusan pada sebuah kebijakan. Pada variabel ini untuk menganalisis faktor pengambil keputusan yang dilakukan oleh Joe Biden, penulis menggunakan 3 indikasi yang sesuai yaitu *Non Human*

Environment dengan Letak Geografis dan Ekonomi AS, *Society* dengan Respons domestik, dan *Human Environment* dengan Ideologi Politik dan ideo karakteristik Joe Biden.

2.2.1 Faktor *Non-Human Environment* Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden

Pada subbab indikator *Non-Human Environment* akan menjelaskan faktor internal yang memengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi era Joe Biden. Dalam buku Snyder, tidak ada penjelasan khusus mengenai *Non-Human Environment* akan tetapi dapat di artikan sebagai lingkungan non-manusia, dalam bukunya Snyder menjelaskan bahwa letak geografis salah satu faktor yang obyektif, dan dapat menentukan kondisi terhadap tindakan negara (Snyder, et al. 2002, 49). Letak geografis merupakan lingkungan non-manusia dan salah satu faktor struktural yang dapat memberikan pengaruh, geografis tidak dapat diubah oleh aktor pengambil keputusan akan tetapi dapat menciptakan sebuah pengaruh yang harus di respon para aktor pengambil keputusan.

Letak Geografis yang berdekatan antara AS-Meksiko menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan imigrasi yang diambil oleh Joe Biden, letak tersebut berbatasan langsung kurang lebih sepanjang 3.000 km antara kedua negara. Perbatasan antara AS-Meksiko menjadi jalur utama masuknya para imigran dari Meksiko dan beberapa negara lainnya. Selain itu letak geografis menjadi sebuah pendorong untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara terdekat seperti

Amerika Tengah dan khususnya Meksiko (Az-Zahra 2024). Bagi Joe Biden sebagai aktor pembuat keputusan, letak geografis antara AS-Meksiko merupakan sebuah kendala karena menjadi jalur utama masuknya para *undocumented immigrant* dan secara tidak langsung tidak dapat menutup arus imigrasi secara sempurna. Disisi lain, letak geografis menjadi sebuah *opportunity* untuk melakukan hubungan bilateral dengan Meksiko dalam penanganan arus imigrasi.

Letak geografis antara AS-Meksiko mempengaruhi sebuah hubungan bilateral antar kedua negara tersebut. Joe Biden pada kebijakannya berupaya untuk meningkatkan kerjasamanya dengan pemerintah Meksiko dalam menangani isu *undocumented immigrant*. Selain bertujuan untuk menangani akar dari isu imigran, Biden melakukan program lainnya seperti pembangunan ekonomi yang inklusif untuk mengurangi penyebab mendasar dari imigran yaitu kemiskinan dan kekerasan di negara asal para imigran (Republika 2021).

Kondisi letak geografis berdekatan antara AS-Meksiko yang membentang sangat panjang dengan kondisi pegunungan, gurun, dan aliran sungai menyebabkan pengawasan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan *Trump Wall* melainkan perlu dikombinasikan dengan teknologi, dan hubungan bilateral dengan Meksiko. Data statistik dari CBP *Enforcement Statistics* FY2022 mencatat lebih dari 2,2 juta penangkapan imigran di daerah perbatasan oleh *Border Patrol* (National Media Relase 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis yang berdekatan mengakibatkan tingginya arus migrasi, dan tingginya data penangkapan menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan dorongan akibat longgarnya pengawasan secara fisik. Sejalan dengan teori Snyder yang menyatakan bahwa kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang digunakan dalam pengambil keputusan, harus mencari sebuah penyebabnya karena tidak dapat dilihat hanya dengan *deterministik* (Snyder, et al. 2002, 50).

Letak geografis antara AS-Meksiko memiliki kondisi iklim yang ekstrem, kondisi tersebut berdampak bahaya hingga menyebabkan kematian bagi imigran yang melalui rute tersebut. Patroli mencatat sebanyak 149 imigran meninggal dikarenakan cuaca panas yang ekstrem, dan seorang petugas CBP yang namanya tidak ingin disebutkan menyatakan bahwa seringkali imigran yang melewati rute perbatasan tidak siap dengan cuaca yang sangat panas sehingga banyak memakan korban jiwa. Hal tersebut merupakan ulah para penyeundup manusia yang bekerja untuk kartel narkoba Meksiko yang kejam, tidak memberikan air dan makanan yang cukup bagi imigran yang membayar untuk petunjuk jalan menuju AS (Figueroa 2024). Biden sebagai aktor pembuat keputusan merespon pendekatan yang lebih humanis, Biden memberikan statment bahwa akan terus melakukan segala hal untuk menghentikan para penyelundupan narkoba dan manusia agar tidak

mengambil keuntungan dari orang-orang rentan yang ingin memasuki AS (Liptak 2022).

Dalam *Non-Human Environment* selain dari faktor letak Geografis Ekonomi juga berperan penting dalam indikator ini sebagai pendorong arah kebijakan imigrasi. Dalam teori Snyder menyatakan bahwa tujuan dari tindakan negara dikategorikan sebagai kekuasaan atau keamanan, ekonomi, moral, ideologi, dan prestise (Snyder, et al. 2002, 72).

Seperti halnya di negara AS bahwa Ekonomi menjadi salah satu faktor perubahan kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh Joe Biden. Pada masa awal jabatannya, Biden menghadapi sebuah tantangan yang besar dalam perekonomian AS pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan gangguan terhadap pasar tenaga kerja dan perekonomian, dan selama pandemi Covid-19 imigran dianggap sebagai pekerja yang tidak dapat diabaikan karena memiliki tingkat kewirausahaan cukup tinggi sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Joint Economic Committee, Immigrants Are Vital to the US Economy).

Hal ini sejalan dengan teori teori snyder yang menyatakan bahwa tujuan negara untuk menentukan sebuah kebijakan salah satunya yaitu ekonomi. Dimana kondisi pasca pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian AS sehingga kebijakan imigrasi yang terbuka merupakan sebuah

peluang untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. Imigran yang terampil dan memiliki potensi akan membantu memperkuat dan memulihkan perekonomian.

Pendekatan kebijakan imigrasi yang diambil oleh Joe Biden menunjukkan bahwa perekonomian salah satu bagian indikator *Non-Human Environment* menjadi salah satu faktor tujuan pembuatan kebijakan imigrasi hal ini didukung oleh aktivis *Dreamers* yang memperkuat dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap para imigran muda.

Tenaga kerja pasar AS masih sangat membutuhkan pekerja khususnya sektor konstruksi dan pertanian yang menjadi penyebab utama banyaknya migrasi tidak sah. Sehingga solusi yang tepat bukanlah pengetatan perbatasan, tetapi menciptakan jalur legal bagi pencari suaka asal Meksiko secara sah (Washington, DC: Migration Policy Institute, May 2025). Sehingga dalam pertimbangannya Joe Biden mengambil langkah kebijakan salah satunya menekankan terhadap sistem yang tidak hanya memberikan perlindungan imigran legal dan mendukung imigran untuk berkontribusi pada ekonomi AS akan tetapi juga ada kepentingan lain yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas tenaga kerja di AS.

2.2.2 Faktor *Society* Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden

Pada subbab indikator *Society* ini akan menjelaskan faktor dari persepsi dan reaksi masyarakat AS yang mendorong terbentuknya arah kebijakan imigrasi era Joe Biden. Menurut Snyder, *society* merupakan faktor pengaruh yang berasal dari

kondisi dalam masyarakat, dan unit sosial tersebut dapat mendorong, mengubah, atau membatasi arah kebijakan para pengambil keputusan (Snyder, et al. 2002, 61).

Respons dari masyarakat AS sangat memainkan peran penting dalam perubahan kebijakan imigrasi yang diambil oleh Joe Biden. Kebijakan imigrasi pada era Donald Trump banyak mendapat kritik negatif dari beberapa kelompok masyarakat AS sehingga pada masa kampanye dan awal masa jabatannya Biden berjanji untuk membatalkan kebijakan keras pada era Donald Trump dan menciptakan peluang bagi jutaan imigran gelap yang sudah lama berada di AS (Hiebert et al. 2024).

Joe Biden menghadapi berbagai tekanan dari kelompok masyarakat di AS yang dimana mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap kebijakan imigrasi. Beberapa kelompok berpandangan pro terhadap kebijakan imigrasi yang lebih humanis dan inklusif, kelompok tersebut diantaranya para aktivis imigran seperti *United We Dream* (UWD), organisasi HAM seperti *Make the Road New York*, dan pendukung dari partai Demokrat.

Masyarakat AS yang pro terhadap imigran melakukan aksi demonstrasi yang seringkali melibatkan ribuan peserta untuk meluncurkan aksinya menyuarakan akses yang mudah bagi imigran untuk menetap secara legal di AS, perlindungan hak-hak terhadap imigran dan menyuarakan perlindungan bagi mereka yang terancam dari deportasi, demonstrasi tersebut diadakan di beberapa kota besar di AS seperti Washington, Ohio dan West Virginia. Salah satu contoh demonstrasi yang mendesak Joe Biden untuk memenuhi janji kampanyenya merubah kebijakan imigrasi yaitu terjadi pada tahun 2021 di Washington, para demonstran melakukan aksi demonstrasi untuk mendapatkan solusi yang efektif terhadap kebijakan

imigran yang lebih terbuka dan bagi mereka yang ingin menjadi imigran legal (Silverman 2021).

Masyarakat AS yang berasal dari Ohio dan West Virginia juga melakukan demonstrasi terhadap pemerintah AS dan menuntut Biden untuk mengakhiri kebijakan yang sangat tidak manusiawi. Kebijakan tersebut telah melakukan sebuah penculikan terhadap anak-anak, mereka melakukan protes tidak menerima kebijakan yang menggunakan anak-anak sebagai alat sandera demi kepentingan politik. Selain itu, kelompok warga keturunan dari India yang dikenal sebagai warga asli AS juga turut melakukan demonstrasi. Salah satu kebijakan yang memisahkan keluarga merupakan kebijakan yang tidak patut untuk diimplementasikan menurut masyarakat AS (Ramadhani, Apriwan, and Setyaka 2023, 49-50).

UWD dan kelompok aktivis muda imigran lainnya sudah sejak dari pemerintahan Barack Obama memperjuangkan kebijakan penerima DACA bisa mendapatkan sebuah akses ke pelayanan kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau ACA. Hal tersebut menjadi salah satu hasil konkret dari perjuangan para aktivis yang menginginkan sebuah perubahan dari kebijakan imigrasi di era Joe Biden, dan Joe Biden sebagai pembuat keputusan terdorong untuk melakukan perubahan.

Selain terjadinya demonstrasi yang meluas, para aktivis dan masyarakat yang mendukung kebijakan imigrasi yang dirumuskan oleh Joe Biden melakukan

kampanye melalui media sosial dengan tagar *#WeAreHome* yang bertujuan untuk menghentikan kebijakan imigrasi era Donald Trump, menciptakan sebuah kebijakan yang adil terhadap imigran, dan melindungi hak-hak jutaan para imigran untuk mendapatkan dokumen legal (We Are Home 2021).

Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah respons dari banyaknya peristiwa yang terjadi akibat pengimplementasian kebijakan yang tidak manusiawi, pemisah keluarga dan menyandera anak-anak sebagai alat politik yang diprotes oleh masyarakat AS merupakan sebuah contoh konkret yang menunjukkan bahwa sebuah kebijakan yang diimplementasikan dapat memicu respons sosial secara luas. Snyder menyatakan dalam bukunya bahwa lapangan merupakan sebuah objek yang mencakup fenomena yang luas dan banyak yaitu peristiwa dan tindakan. Dalam hal tersebut banyaknya entitas politik yang terlibat didalamnya, dan banyaknya interaksi yang menciptakan sebuah situasi kompleks (Snyder et al. 2002, 53).

Pada faktor internal dari indikator *Society*, yaitu tindakan protes dan demonstrasi meluas yang dilakukan oleh masyarakat AS dan organisasi domestik terkait HAM terhadap kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh Donald Trump menjadi faktor penting yang mendorong perubahan kebijakan imigrasi pada era pemerintahan Joe Biden. Demonstrasi yang dilakukan besar-besaran oleh masyarakat AS bukanlah sekedar aksi protes, tetapi sebuah indikator yang

ditujukan untuk pemerintah bahwa masyarakat menginginkan sebuah perubahan kebijakan yang nyata. Snyder menyatakan bahwa jika seseorang tertarik dengan melayangkan pertanyaan “mengapa” yang mendasari perilaku dari sebuah negara, maka dalam pencarian jawaban tersebut bisa difokuskan pada suatu kondisi dan faktor seperti moral, tekanan, dan sikap publik (Snyder, et al. 2002, 61). Demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan masyarakat yang pro terhadap imigran berhasil menciptakan sebuah pengaruh yang menekankan pada pentingnya sebuah perlindungan terhadap hak-hak imigran dan memperlihatkan dampak dari kebijakan imigrasi yang ketat.

Untuk menganalisis tindakan yang terjadi setelah situasi tertentu memungkinkan untuk menekankan bahwa perilaku sebuah negara dipengaruhi oleh situasi yang terjadi (Snyder et al. 2002, 75). Dalam situasi yang terjadi dengan adanya respons dari para aktivis dan para masyarakat AS menjadi sebuah jembatan bagi pembuat keputusan untuk memastikan apakah sebuah kebijakan dapat diterima atau bahkan sebuah kebijakan yang dikritik oleh publik sehingga menjadi evaluasi bagi pemimpin selanjutnya untuk melakukan sebuah perubahan.

Sesuai dengan teori Snyder yang menyatakan bahwa unit sosial dapat mendorong, merubah, hingga membatasi perilaku pengambil keputusan. Pada isu imigran di perbatasan AS-Meksiko Joe Biden sebagai aktor pembuat keputusan mengambil langkah untuk memenuhi janjinya dengan merespons harapan para masyarakat AS yang menginginkan sebuah kebijakan yang lebih positif dalam pendekatan kebijakan imigrasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam hasil data yang ditemukan, yang menunjukkan bahwa pada awal pemerintahannya, Biden segera

mengambil tindakan untuk membatalkan beberapa kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh Trump. Biden sebagai pengambil kebijakan tidak hanya mendapat tekanan akan tetapi mendapatkan dukungan oleh narasi-narasi yang dikampanyekan para pendukung kebijakan imigrasi Biden yang telah dirumuskan.

2.2.3 Faktor *Human Environment* Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden

Faktor Joe Biden sebagai aktor pembuat keputusan kebijakan imigrasinya dapat dilihat melalui indikator *Human Environment* dari teori Richard Snyder yang menekankan terhadap nilai moral sosial, dan asumsi yang diberikan kepada manusia dalam membatasi sebuah tujuan dan cara-cara yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (Snyder, et al. 2002, 129). Faktor nilai moral sosial akan dijelaskan melalui ideologi Partai Demokrat dan ideokarakteristik Joe Biden yang mendorong perubahan arah kebijakan imigrasi era Joe Biden.

Snyder menyatakan bahwa perlu lebih banyak menganalisis secara menyeluruh pada lembaga-lembaga yang tersedia, karena perilaku dari aktor pengambilan keputusan sebagian besar dikondikan oleh sebuah arahan, peraturan, preseden dan ideologi dari lembaga-lembaga yang tersedia (Snyder, et al. 2002, 52-53). Pertama ideologi Partai Demokrat, faktor ini dapat dijelaskan dengan isu politik domestik yang menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan kebijakan imigrasi yang diadopsi oleh Joe Biden. Pembentukan kebijakan imigrasi di AS dimainkan penting pada ideologi Partai Demokrat.

Partai Demokrat merupakan partai yang dikenal sangat mendukung kebijakan imigrasi yang lebih terbuka terhadap imigran, Partai Demokrat sangat

menentang kebijakan imigrasi proteksionis yang diimplementasikan oleh Trump. Partai Demokrat menyatakan akan mengakhiri kebijakan-kebijakan imigrasi Donald Trump yang keras dan tidak ingin memberikan perlindungan terhadap para pencari suaka, dan Partai Demokrat berjanji akan mengakhiri kebijakan yang memberikan tuntutan terhadap suaka di perbatasan (Democratic National Committee 2020, 62).

Partai Demokrat sangat konsisten untuk menolak semua kebijakan imigrasi era Donald Trump yang dianggap sebagai kebijakan yang tidak manusiawi, Partai Demokrat memiliki kepercayaan bahwa AS harus menjadi sebuah negara harapan bagi para imigran yang mengalami tindakan kekerasan dan ketidakadilan di negara asal mereka. Partai Demokrat akan memberikan peluang kewarganegaraan bagi jutaan imigran pekerja tidak berdokumen yang berkontribusi terhadap perekonomian AS (Democratic National Committee 2020, 62).

Hal tersebut membentuk sebuah preferensi Joe Biden sebagai pengambil keputusan. Pada 2 Februari 2021 Joe Biden menandatangani tiga keputusan presiden untuk mereformasi sistem imigrasi AS. Tindakan tersebut melanjutkan keputusan presiden pada 20 Januari tentang mengakhiri larangan diskriminasi terhadap imigrasi yang berdampak pada sekelompok kecil negara. Pada upacara penandatanganan Joe Biden memberikan statement “ini merupakan bagian bagaimana AS menjadi lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur ketika kita

memiliki sistem imigrasi yang adil, tertib, manusiawi, dan legal”. Ketiga keputusan tersebut dirancang untuk merestrukturisasi sistem imigrasi AS agar dapat menyambut para imigran, menjaga kebersamaan keluarga, dan mendorong para imigran untuk berkontribusi penuh terhadap Amerika Serikat. Keputusan-keputusan tersebut bertujuan juga untuk mengubah kebijakan yang menghambat akses dan kelayakan untuk mencari perlindungan di AS (Share America 2021).

Tidak hanya Joe Biden, pada masa kepemimpinan Barack Obama juga memiliki kecenderungan yang mengedepankan prinsip-prinsip Partai Demokrat terhadap HAM dalam menangani isu migrasi di AS. Program DACA yang diinisiasi oleh Barack Obama merupakan salah satu bukti nyata yang memberikan sebuah perlindungan terhadap para anak-anak imigran tanpa dokumen, selain itu Barack Obama menginterupsi untuk melakukan dengan lebih manusiawi terhadap penegakan hukum imigrasi (The Obama Foundation 2022). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Partai Demokrat yang menentang kebijakan proteksionis era Donald Trump. Partai Demokrat percaya bahwa sebuah penyiksaan tidak bermoral dan tidak efektif yang dilakukan pada pemerintahan Donald Trump hanya memberikan umpan bagi para musuh AS (Democratic National Committee 2020, 85)

Faktor kedua dari indikator *Human Environment* selain ideologi dari partai politik yaitu *Ide-karakteristik* Joe Biden. Dilihat latar belakang Joe Biden yang merupakan seorang senator senior dari Delaware periode tahun 1973-2009, seorang

dari bagian partai Demokrat serta politisi bagian pandangan tengah kiri, dan juga menunjukan sebagai kepemimpinan yang multilateral dan orientasi global dengan slogannya yang berbunyi “*American Is Black*” (Dewan and McGee 2021). Dilihat dari historis nya dapat menjadi sebuah pembentukan cara Joe Biden mengambil sebuah keputusan, selain itu karakteristik yang dimiliki Joe Biden menjadi salah satu faktor pendorong pendekatan kebijakan imigrasi yang lebih *humanis*.

Joe Biden yang merupakan seorang dari demokrat menganut prinsip demokratis, pragmatis, empatik, adaptif, dan kolaboratif. Karakteristik seperti itu membuat seseorang menjadi lebih peduli dengan kesejahteraan HAM, terbuka, realistis, fleksibel dan menerima masukan serta dukungan dari pihak lain (Az-Zahra 2024,47-49). Berhubungan dengan seorang dari bagian partai Demokrat yang mementingkan nilai kemanusiaan dan keadilan tercermin dalam beberapa tindakan yang dilakukannya seperti penghentian pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang merupakan sebuah simbol dari kebijakan Donald Trump, dan menghentikan kebijakan *Zero Tolerance*. Dengan kepribadian Joe Biden yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengaruh karakteristik Joe Biden sebagai pelaku *Decision Maker* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi pada kepemimpinannya.

Pada variabel *Internal Setting* yang menjadi faktor perubahan kebijakan imigrasi era Joe Biden mencerminkan keterkaitan antara indikator satu dengan yang lainnya. Pertama Letak Geografis sebagai akses masuknya imigran Meksiko dan

Ekonomi yang merupakan bagian dari indikator *Non-Human Environment* dipandang sebagai potensi strategis untuk memulihkan dan memperkuat masalah perekonomian domestik setelah pandemi Covid-19 melalui kontribusi tenaga kerja, dan program DACA dengan membuka akses legal terhadap imigran muda yang lebih produktif. Faktor tersebut mendapat dukungan dari indikator *Society* yang menuntut pada pendekatan lebih adil terhadap imigran dan mengharapkan terhadap nilai dan harapan publik. Di sisi lain, dua indikator tersebut sejalan dengan faktor *Human Environment* yaitu ideologi Partai Demokrat dan ideo-karakteristik Joe Biden yang menekankan terhadap pendekatan berbasis HAM, progresif, dan humanistik.

2.3 Analisis Faktor *Social Structure and Behavior* Berdasarkan Decision

Making Theory Richard Snyder

Setelah melihat faktor internal, Snyder juga menjelaskan faktor *social structure and behavior* untuk menganalisis dinamika nilai-nilai dan perilaku masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan Joe Biden. Faktor pertama dalam variabel ini yaitu indikator *Major Common Value Orientations*, Richard Snyder menjelaskan mengenai *Major Common Value Orientations* merupakan nilai yang dianut oleh para masyarakat yang akan mempengaruhi pembuat keputusan untuk membentuk sebuah kerangka besar (Snyder, et al. 2002, 129). Kebebasan merupakan nilai tradisi masyarakat Amerika Serikat yang bisa dipahami sebagai perlindungan hak-hak individu. Pandangan ini berasal sejak Deklarasi Kemerdekaan yang diajarkan oleh John Lock, dengan pernyataannya bahwa semua manusia diciptakan setara memiliki kebebasan, hak untuk hidup, dan

mengejar sebuah kebahagiaan. Nilai kebebasan ini penting untuk pembatasan dari kekuasaan pemerintah untuk melindungi setiap hak-hak individu dari sebuah pelanggaran (Scott 2014).

Biden mengecam kebijakan imigrasi yaitu *Family Separation* dan mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam AS (Quinn 2020). Biden melakukan sebuah reformasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih humanis, menurut survei dari *Public Religion Research Institute* pada tahun 2020 menunjukkan sekitar 33% responden mendukung kebijakan Joe Biden dan hanya 7% yang menolak kebijakan tersebut (Orches 2021).

Hal tersebut menunjukkan bahwa publik mendukung kebijakan Joe Biden yang mengedepankan nilai bangsa AS. Hal ini sejalan dengan teori Snyder, dimana Snyder menjelaskan ada dua jenis penting dari *Major Cammon Value Orientation* : 1. Pengaruh bagaimana aktor pembuat keputusan memandang dunia 2. Sebuah keputusan yang telah di rumuskan oleh pembuat keputusan dapat diterima oleh masyarakat (Snyder, et al. 2002, 128). Dengan mereformasi kebijakan yang lebih humanis, yang ditandai dengan penghentian kebijakan *Family Separation* terlihat bahwa Joe Biden memandang nilai-nilai dasar AS yang dapat mempengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi era Joe Biden.

Pada indikator *Major Cammon Value Orientation* membentuk kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh Joe Biden sesuai dengan nilai-nilai demokrasi di AS yaitu sebagai pemerintah dapat melindungi hak-hak individu dengan melakukan reformasi kebijakan imigrasi menggunakan pendekatan yang lebih humanis.

Kedua faktor dari indikator *Major Institutional Patterns*, menurut Snyder struktur insitutsi yaitu lembaga-lembaga seperti Departmen Pertahanan, Departmen Luar Negeri, dan Kongres memainkan peran penting dalam keputusan politik luar negeri (Snyder, et al. 2002, 83). Khususnya untuk menganalisis terbentuknya kebijakan imigrasi era Biden, dapt dilihat melalui peran kongres, salah satunya peran kongres dimana *House of Representative* dan senat memaksa kepada Joe Biden untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan imigrasi yaitu *U.S. Citizenship Act of 2021* dengan tujuan politik yang terpolarisasi. Pada saat itu Joe Biden gagal mendapat banyak suara dari senat akan tetapi kebijakan tersebut didukung kuat oleh *House of Representative* yang relatif berasal dari Partai Demokrat. Dalam isu tersebut Partai Demokrat harus memperoleh dukungan setidaknya 10 senator Republik (CNBC 2021).

Kombinasi antara polarisasi politik, *filibuster*, dan ketidaksediaan senat memberikan suara akibat tidak ingin mengambil resiko tinggi dalam isu sensitif, menyebabkan terhambatnya pengimplementasian kebijakan *U.S. Citizenship Act of 2021*. Dapat dilihat dari hal lain, DPR AS melakukan sidang melalui *House Judiciary Committee* mengenai penghentian kebijakan *Remain in Mexico*. Biden memiliki kewenangan untuk mengakhiri kebijakan MPP, yang didukung oleh DPR dan senat dengan memberikan legitimasi terhadap pemerintah federan untuk menindaklanjuti kasus nya ke Mahkamah Agung (García 2022). Hal ini dapat terlihat bahwa peran dari indikator *Major Institutional Patterns* menjadi salah satu terbentuk dan tidak terbentuknya keputusan di era Joe Biden.

Faktor ketiga yaitu *Role Differentiation and Specialization* yang merupakan suatu proses pembagian peran dan tugas berdasarkan pada generalisasi atau

spesialisasi fungsi (Snyder, et al. 2002, 101). Pembagian peran secara jelas berdasarkan keahlian dan otoritas, menentukan kebijakan dapat dirumuskan dan dijalankan. Presiden Joe Biden memiliki otoritas utama sebagai pembuat keputusan menentukan arah kebijakan melalui *executive orders*.

Indikator ini juga berkaitan dengan *Major Institutional Patterns*, dimana kongres memiliki peran legislatif dalam mengatur sebuah kerangka hukum dan alokasi anggaran sementara Mahkamah Agung terlibat dalam pengawasan legitimasi kebijakan. Selain itu peran masyarakat seperti opini publik yang berkaitan langsung dengan variabel internal juga penting dalam memberikan tekanan moral sesuai dengan teori Snyder dimana pada variabel *social structure and behavior* Snyder menekankan terhadap nilai dan pola interaksi sosial merupakan bagian penting dalam menentukan sebuah keputusan. Pada bab selanjutnya akan menjelaskan faktor *Decision Making Process and Decision Maker, Action*, dan *External Setting* yang mendorong perubahan kebijakan imigrasi era Joe Biden. Snyder menyatakan dalam bukunya bahwa faktor-faktor pada proses pengambilan keputusan terjadi karena interaksi antara dua aspek, dan faktor-faktor yang membentuk setting internal dan eksternal saling memengaruhi satu sama lain (Snyder et al. 2002, 66).

BAB 3

ANALISIS *DECISION MAKING PROCESS, ACTION, DAN FAKTOR EXTERNAL* BERDASARKAN *DECISION-MAKING THEORY* RICHARD SNYDER

Bab ini menganalisis *Decision Making Process-Decision Makers* dalam Konteks Kebijakan Imigrasi Joe Biden, Action yang dilakukan oleh Joe Biden setelah melihat faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan dan terkait faktor *external* yang menjadi pengaruh terbentuknya kebijakan luar negeri imigrasi di era kepemimpinan Joe Biden menggunakan *Decision Making Theory* yang dicetuskan oleh Richard Snyder. Pada variabel *External Setting*, Snyder menjelaskan terdapat 4 indikator akan tetapi analisis ini hanya berfokus pada indikator *Non-Human Environment* dan *Societies Organized and Functioning as States and Governments*. Hal itu dikarenakan indikator ini relevan dengan faktor pendorong Joe Biden dalam mengambil keputusan. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan dan peran Biden sebagai *decision maker* dalam menentukan arah kebijakan imigrasi pada masa kepemimpinannya, selain itu untuk memahami interaksi faktor internasional membentuk arah kebijakan imigrasi era Joe Biden khususnya pada Tekanan dari Negara serta Organisasi Internasional.

3.1 Implementasi *Decision Making Process-Decision Makers* dalam Konteks Kebijakan Imigrasi Joe Biden

Dalam *Decision Making Theory* Richard Snyder menekankan bahwa sebuah analisis kebijakan luar negeri difokuskan terhadap proses pengambilan keputusan, dan aktor yang membuat keputusan (Snyder, et al. 2002, 76). Dalam isu hubungan internasional yang sedang dibahas, Joe Biden merupakan aktor utama yaitu *Decision Maker* yang bertindak atas negara AS dan memiliki konstitusional dalam menentukan arah kebijakan. Para pengambil keputusan dipengaruhi oleh dua situasi yaitu internal dan eksternal (Snyder, et al. 2002, 5).

Langkah pertama mengidentifikasi masalah melalui dua situasi yaitu internal dan eksternal, dalam situasi tersebut menemukan banyak informasi terkait masalah yang perlu di pertimbangkan. Dalam teori Snyder menyatakan bahwa jika dalam tahap pengambil keputusan, informasi merupakan suatu keharusan. Snyder menekankan 2 poin utama yaitu darimana permasalahan itu muncul, dan apakah informasi tersebut cukup jelas untuk ditindaklanjuti (Snyder, et al. 2002, 112).

Salah satu kasus nyata yaitu kebijakan kontroversial pada era Donald Trump banyak mendapat kritik negatif dari beberapa kelompok masyarakat AS yang merupakan bagian dari faktor internal dan diperkeruh dengan tantangan eksternal yaitu kritik organisasi internasional sehingga pada masa kampanye dan awal masa jabatannya Biden berjanji untuk membatalkan kebijakan keras pada era Donald Trump dan menciptakan peluang bagi jutaan imigran gelap yang sudah lama berada di AS (Hiebert et al. 2024). Dalam kasus ini permasalahan berasal dari kebijakan kontroversial era Donald Trump, dan permasalahan tersebut cukup jelas untuk ditindaklanjuti karena terjadinya kritik negatif dari 2 arah yang menjadi

pertimbangan Biden sebagai pembuat keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kebijakan kontroversial tersebut.

Dalam proses pertimbangan Joe Biden sebagai pengambil keputusan, Snyder menekankan bahwa harus mempertimbangkan faktor nilai yang menjadi sebuah batasan untuk menjadi pilihan (Snyder, et al. 2002, 129). Dalam hal ini Biden tidak mempertahankan sebuah kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti kebijakan *Zero Tolerance and Family Separation* dan nilai-nilai bangsa AS yang menjunjung tinggi nilai HAM menjadi salah satu pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih humanis.

Dilihat dari janji Biden untuk membatalkan kebijakan keras dan memilih jalur *executive order* mencerminkan Biden sebagai pembuat keputusan mempertimbangkan antara janji, nilai kemanusiaan dan diperkuat dengan kongres. Selanjutnya Snyder menekankan sebuah keputusan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Menurut Snyder Action merupakan aksi dalam suatu negara atau pilihan dan aksi dari aktor *decision making*. Dimana suatu peristiwa tidak dapat diteliti hanya dengan menggambarkan kondisi dan hal tertentu akan tetapi harus melihat bagaimana hasil dari tindakan yang diambil (Snyder, et al. 2002, 35). Hal ini dapat menjelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan Joe Biden sebagai aktor pembuat keputusan setelah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah keputusan.

Ada beberapa faktor Internal Setting yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan imigrasi di era Joe Biden. Pada indikator *Non-Human Environment*, yaitu pertama letak geografis sebagai faktor terbentuknya kebijakan imigrasi. Mengenai permasalahan yang diakibatkan oleh letak geografis tersebut, Biden memberikan

respon mengatakan bahwa akan mengamankan perbatasan dengan mereformasi sistem imigrasi yang lebih tertib, adil, dan manusiawi. Pada pidato Biden tepatnya 5 Januari 2023, Biden memberikan penekanan untuk memberikan jalur yang resmi aman, dan manusiawi dibandingkan dengan cara ilegal dan berbahaya, dan melakukan ekspansi proses *parole* humanis dengan *mekanisme legal modern* (The White House 2023).

Hal ini sejalan dengan teori Snyder yang mengatakan bahwa letak geografis merupakan faktor yang obyektif, dan dapat menentukan kondisi terhadap tindakan negara. Para negarawan pada dasarnya merupakan tawanan keadaan dan hanya dapat bebas sejauh yang diizinkan negara (Snyder, et al. 2002, 49). Sebagai presiden, Biden hanyalah tawanan keadaan karena tidak dapat mengubah keadaan geografis akan tetapi hanya dapat menyesuaikan sebuah kebijakan yang lebih realistis. Kondisi geografis antara AS-Meksiko secara langsung mendorong Biden untuk mengimplementasi kebijakan yang lebih humanis. Kedua ekonomi, dalam faktor ini Joe Biden sebagai *Decision Maker* merespon faktor ekonomi dengan mempertahankan kebijakan DACA yang memungkinkan lebih banyak imigran muda untuk berkontribusi terhadap ekonomi AS (The White House 2024).

Pada indikator *Society* merupakan faktor dari tekanan yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat AS, Joe Biden sebagai *Decision Maker* merespon faktor tersebut dengan menghapus kebijakan yang tidak dapat diterima oleh publik seperti

mencabut kebijakan *Zero Tolerance* dan *Family Separation*, Hingga sudah terlihat pada masa kampanye dan awal masa jabatannya Biden berjanji untuk membatalkan kebijakan keras pada era Donald Trump dan menciptakan peluang bagi jutaan imigran gelap yang sudah lama berada di AS (Hiebert et al. 2024). Selain itu untuk merespon kelompok sosial AS seperti UWD yang memperjuangkan terhadap kebijakan DACA, pada 2023 dibawah pemerintahan Joe Biden mengabulkan tuntutan tersebut dengan menetapkan aturan baru bahwa mereka akan dilindungi, yang dimana sebelumnya tidak dapat mengakses asuransi kesehatan karena terhalang oleh status imigrasi (United We Dream Action 2024).

Pada indikator *Human Environment*, pertama faktor dari ideologi Partai Demokrat yang mendukung terhadap kebijakan terbuka dan mengecam kebijakan imigrasi era Donald Trump. Joe Biden sebagai *Decision Maker* yang merupakan perwakilan dari partai demokrat melakukan penghentian terhadap kebijakan imigrasi era Donald Trump yang menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah perbatasan AS-Meksiko yaitu kebijakan *Remain in Mexico* yang memaksa para pencari suaka menunggu sementara di perbatasan AS-Meksiko untuk menunggu proses permohonan mereka yang diajukan (Associated Press 2022).

Kedua yaitu faktor dari *Ideokarakteristik* Joe Biden yang tercermin dalam beberapa tindakannya seperti penghentian kebijakan pembangunan tembok perbatasan dan beberapa kebijakan kontroversial lainnya. Hal ini sejalan dengan

teori Snyder yang menjelaskan bahwa seorang presiden memiliki sebuah keleluasaan yang besar dalam menentukan kebijakannya (Snyder, et al. 2002, 100).

Pada faktor yang disebabkan oleh indikator *Major Cammon Value Orientation* dalam variabel *Social Structure and Behavior*, aksi Joe Biden sebagai *Decision Maker* yaitu melakukan reformasi sistem imigrasi dengan mengusulkan undang-undang yang menciptakan jalur kewarganegaraan bagi para *undocumented immigrant* yang ingin menetap di AS (Gonzalez and Krogstad 2022). Hal ini sejalan dengan teori Snyder yang menyatakan bahwa setiap aktor pengambil keputusan selalu akan menghadapi pilihan seperti menerima dan menolak dari nilai dan norma tertentu (Snyder, et al. 2002, 131). Pada tindakan Joe Biden sebagai *Decision Maker*, mengambil keputusan dengan mereformasi sistem imigrasi yang lebih humanis dapat diartikan bahwa Joe Biden menerima suatu nilai atau norma tertentu.

Selanjutnya, aksi Biden dapat dilihat dari faktor yang disebabkan oleh indikator *Societies Organized and Functioning as States and Governments* dalam variabel *External Setting*, respon Joe Biden sebagai *Decision Maker* yaitu dengan tidak melanjutkan kebijakan-kebijakan kontroversial di era Donald Trump yang dikritik oleh banyak organisasi internasional, dan mengubah arah kebijakan dengan lebih inklusif. Organisasi internasional seperti *Human Right Watch*, PBB, IOM yang turut mengkritik untuk memberhentikan dan tidak melanjutkan kebijakan imigrasi era Donald Trump, sebagai respon Biden pembuat keputusan yaitu mengambil aksi untuk menghentikan kebijakan kontroversial *Zero Tolerance and Family Separation* dan mereformasi sistem kebijakan imigrasi dengan pendekatan yang lebih inklusif (Alvarez and Perez 2021). Dalam tindakan ini dapat dilihat bahwa

Joe Biden sebagai aktor pembuat keputusan menyesuaikan kebijakan imigrasinya dengan norma HAM internasional.

Aksi yang dilakukan Joe Biden sebagai *Decision Maker* pada kerjasama internasional dalam beberapa forum seperti bilateral, trilateral, dan multilateral yang diikutinya Joe Biden memberikan sinyal komitmen dalam melakukan kerjasama penanganan imigrasi yang lebih. Salah satunya Joe Biden meluncurkan sebuah strategi untuk membantu perekonomian para imigran untuk mengatasi akar penyebab migrasi Amerika Tengah dengan memanfaatkan keahlian dan sumberdaya dari kelompok pemangku kepentingan ataupun swasta yang luas demi membangun harapan imigran (Yayboke, Nzuki and Myers 2021).

Melihat keseluruhan aksi Joe Biden sebagai *Decision Maker*, sejalan teori teori Snyder. Menurut Snyder, untuk melihat hasil dari aksi apa yang dipilih oleh pembuat keputusan, itu kita perlu memahami faktor apa yang membuat mereka membuat keputusan tersebut. Pembuat keputusan sering kali berada pada posisi dengan tekanan tinggi untuk menghadapi isu kompleks dengan menekankan banyak pihak yang terkait (Snyder, et al. 2002, 157). Untuk terbentuknya kebijakan imigrasi di era Joe Biden, Joe Biden sebagai *Decision Maker* tidak secara bebas melainkan harus menghadapi tekanan yang banyak, dan waktu yang tidak singkat.

3.2. Faktor Eksternal Dalam Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden

Selain faktor dari variabel internal dan *social structure behavior*, dalam teori nya Snyder faktor juga dapat dipengaruhi oleh variabel eksternal, subbab ini akan menjelaskan faktor *External Setting* yang memainkan peran tidak kalah penting, subbab ini akan menganalisis terkait faktor *Non-Human Environment* pada isu ekonomi, dan faktor *societies organized and functioning as states government*

pada isu pengaruh organisasi internasional dan kerjasama antar pemerintah. faktor ini dapat memperkuat Biden untuk mengambil sebuah kebijakan imigrasi dengan tujuan menciptakan kebijakan yang lebih terbuka dan menegakan keadilan terhadap imigran di AS.

3.2.1 Faktor Non-Human Environment Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden

Seperti analisis bab 2 mengenai faktor *non-human environment* dalam variabel internal, pada faktor *non-human environment* variabel eksternal juga tidak disebutkan secara langsung oleh Snyder dalam bukunya. Akan tetapi dapat diartikan sebagai lingkungan non-manusia, dalam bukunya Snyder disebutkan bahwa program-program tertentu dapat memberikan sebuah kontribusi pada redistribusi sumber daya, pendapatan, dan kekuatan sosial (Snyder, et al. 2002, 61). Analisis ini berfokus terhadap sumber daya dan juga pendapatan.

Kebijakan imigrasi di perbatasan AS-Meksiko yang diimplementasikan oleh presiden Joe Biden bisa dilihat relevansinya dengan variabel faktor eksternal pada konteks *Decision Making Process*. Kondisi ketidakstabilan ekonomi di negara asal mendorong para imigran untuk bermigrasi ke AS, isu ini dapat dilihat melalui data upah pekerja imigran. Para imigran yang bekerja di AS memperoleh upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah pekerja yang bukan imigran, hal tersebut membuat peran mereka dibutuhkan. Menurut data dari BLS menunjukan bahwa upah imigran lebih rendah yaitu sebesar US\$945 perminggu dibanding pekerja lokal sebesar US\$1.087 per minggu (U.S. Bureau of Labor Statistics 2025). Fakta tersebut melitahkan bahwa dapat berpotensi ketergantungan struktural

ekonomi AS terhadap para imigran yang berupah rendah, dikarenakan menguntungkan AS dan para masyarakat pemilik perusahaan.

Selain itu, Snyder menyatakan bahwa keseluruhan dari kebutuhan masyarakat dan termasuk pada kebutuhan nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu masuk kedalam motivasi para pengambil keputusan (Snyder, et al. 2002, 130). Hal ini bersangkutan pada variabel internal dalam elemen society yang dimana para pemimpin perusahaan industri teknologi menyuarakan aspirasinya terhadap perubahan kebijakan imigrasi dikarenakan bergantung terhadap pekerja imigran karena mengandalkan keterampilan tinggi imigran untuk memenuhi kebutuhan dalam pekerjaannya (Pujiyanti 2017, 6).

Sesuai dengan teori *Decision Making Theory* Snyder, isu upah rendah pekerja migran asal Meksiko merupakan elemen *non-human environment* pada variabel *external setting*. hal tersebut bisa dikatakan dalam kategori *non-human environment* dikarenakan terjadinya ketidakstabilan ekonomi di negara asal imigran, hal tersebut merupakan faktor material yang berada di luar kendali pemerintah AS, akan tetapi berdampak signifikan terhadap arus imigrasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini bisa dikatakan sebagai isu yang dapat membatasi ataupun mendorong Biden sebagai pembuat keputusan untuk menyesuaikan kebijakan imigrasi.

Dalam konteks isu upah rendah, Joe Biden sebagai pengambil keputusan harus mencari jalan tengah antara kepentingan domestik ataupun realitas eksternal. Seperti perangkat yang membatasi peraturan pilihan Biden, dimana aturan imigrasi di AS mengenai kuota visa H-2A (pertanian) dan H-2B (non-pertanian). Hal tersebut sejalan dengan teori Snyder yang mengatakan bahwa pengambil

keputusan memiliki sebuah preferensi dimana mereka menghargai alternatif yang lebih tinggi dari pada yang lainnya (Snyder, et al. 2002, 142-143).

Joe Biden sebagai pembuat keputusan mempertimbangkan aturan imigrasi, dan memutuskan untuk langkah mengambil langkah memperluas aturan imigrasi terkait visa H-2A dan H-B2 yang banyak digunakan pekerja asal Meksiko (Homeland Security 2023). Langkah tersebut mencerminkan bagaimana faktor eksternal *non-human environment* mempengaruhi faktor terbentuknya kebijakan imigrasi Joe Biden untuk memberikan peluang yang luas terhadap imigran yang membutuhkan ekonomi karena ketidakstabilan ekonomi di negara asal.

3.2.2 Faktor Societies Organized and Functioning as States and Government Membentuk Kebijakan Imigrasi Era Joe Biden

Faktor ini akan menjelaskan tindakan dari organisasi internasional dan negara lain yang dapat menjadi faktor pertimbangan Joe Biden mengambil keputusan kebijakan imigrasi. Selaras dengan teori Snyder yang mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan tidak cukup hanya dari faktor pemerintahan akan tetapi organisasi formal maupun non-formal ikut mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan (Snyder, et al. 2002, 41).

Kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh Donald Trump menarik perhatian dunia internasional. Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara aktif mengecam kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh Donald Trump. Kantor Komisi Tinggi PBB mengeluarkan sebuah pernyataan yang berisikan bahwa AS harus menghentikan kebijakan pemisah keluarga imigran setelah melihat kebijakan tersebut telah memisahkan ratusan anak-anak termasuk yang masih sangat kecil terhadap orangtuanya dan

menahan para imigran memasuki AS secara ilegal terutama di perbatasan selatan. Komisi tinggi PBB juga mengkritik kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah AS yaitu *Zero Toleransi*, menurut PBB kebijakan tersebut telah menyebabkan banyak imigran ditahan yang seharusnya berhak untuk mendapatkan perlindungan. PBB menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh Donald Trump bertolak belakang dengan standar HAM, dan bukanlah sebuah tindakan yang memberikan efek jera terhadap para *undocumented immigrant* (Reporter Satu Harapan 2018).

Amnesty International sebagai organisasi yang memantau HAM mengecam kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh Trump. *Amnesty International* mengatakan bahwa pemerintah AS telah melakukan pelanggaran HAM terhadap para pencari suaka dan para imigran yang menyebrang secara ilegal di perbatasan. *Amnesty Internasional* menyatakan bahwa kebijakan imigrasi era Trump merupakan sebuah perilaku kekejaman yang dilakukan dengan sengaja, *Amnesty International* mengatakan bahwa pemerintah AS era Trump merilis sebuah data yang tidak akurat terkait jumlah anak-anak yang dipisahkan oleh orang tuanya (Triyono 2018). Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) juga mengecam kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh Donald Trump, OKI menilai kebijakan tersebut justru memperburuk terorisme dan anarkisme yang terjadi, di mana dunia internasional sedang mengupayakan perlawanan untuk terorisme. IOM memberikan tanggapan prihatin terhadap dampak kebijakan imigrasi yang diimplementasikan oleh Trump terhadap para imigran dan para pencari suaka, selain itu IOM mendesak pemerintah AS era

Donald Trump untuk tetap memberi toleransi kepada para pengungsi perang dan pengungsi atas korban penganiayaan (Pujiyanti 2017,6-7).

Selain desakan dari beberapa organisasi, sekretaris PBB sangat menyambut baik langkah-langkah positif yang telah diumumkan oleh AS terkait pengumuman mengenai imigran dan pengungsi. Berjanji untuk bekerja sama untuk memperkuat dukungan global bagi para imigran dan sekretaris PBB juga mengucapkan selamat kepada Joe Biden dan wakilnya (UN Nations 2021). Selain PBB, IOM juga memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan imigrasi Joe Biden yang berfokus pada pendekatan yang lebih *humanis*, jalur yang aman, dan tertib. IOM menunjukkan dukungan langsung dan harapan untuk terus memperkuat tantangan kemanusiaan terhadap kerja sama internasional. IOM juga menyatakan dengan menekankan bahwa imigrasi harus menjadi pilihan yang sadar, bukan dengan tindakan yang terpaksa akibat kondisi ekstrem. Seperti Covid-19 yang telah memperburuk situasi para imigran, sehingga memerlukan koordinasi antarorganisasi internasional, antar pemerintah, dan masyarakat sipil (IOM UN Migration 2021). Dukungan dari PBB dan IOM terhadap kebijakan imigrasi era Joe Biden mencerminkan bahwa faktor eksternal seperti dorongan dan dukungan organisasi internasional menjadi bagian penting dalam memengaruhi proses perubahan kebijakan imigrasi.

Human Right Watch memberikan kritik bahwa kebijakan Trump merupakan kebijakan ilegal dan melanggar atas HAM. Di kota Ciudad Juarez terdapat pencari suaka dengan kondisi kesehatan yang kronis dan tetap dikembalikan ke Meksiko yang merupakan tempat berbahaya di bawah kebijakan *Remain in Mexico* (Human Right Watch 2020). Pada awal kampanye Joe Biden berjanji untuk mengakhiri kebijakan *Remain in Mexico* dan resmi diakhiri pada Juni 2021. Februari 2021

Biden memenuhi janjinya yaitu mengizinkan pencarian suaka masuk ke AS, namun pada December 2021, Biden terpaksa menerapkan kembali kebijakan tersebut yang disebabkan oleh pengadilan federal dan berjanji untuk memperbaiki (Human Rights Watch 2022).

Kritik dan dukungan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional berperan penting dalam memberikan dorongan terhadap Biden untuk menerapkan kebijakan yang lebih humanis terhadap imigran. Hal tersebut sesuai dengan teori Snyder yang menyatakan bahwa relevansi sebuah faktor dan kondisi tertentu secara umum pada situasi tertentu akan tergantung pada sikap, persepsi, penilaian, dan tujuan dari para pengambil keputusan di negara X, yakni bagaimana mereka bereaksi terhadap berbagai tekanan dan dukungan (Snyder, et al. 2002, 60).

Kebijakan imigrasi tentunya dipengaruhi juga oleh interaksi strategis dengan negara lain, terutama melalui forum pertemuan antara negara yang dihadiri Tingkat Menteri Trilateral diantaranya AS, Meksiko, dan Guatemala. Dalam pertemuan forum tersebut, ketiga negara kerja sama regional untuk menangani arus migrasi dengan cara terbuka, manusiawi, dan teratur melalui pendekatan HAM, jalur mobilitas tenaga kerja yang legal, dan penguatan infrastruktur perbatasan (“Joint Statement: United States, Guatemala, and Mexico Chart New Path for Hemispheric Migration Partnership at Trilateral Ministerial Meeting” 2024).

Deklarasi Los Angeles pada Juni 2022 yang ditandatangani oleh 20 lebih negara di kawasan Amerika tentang Migrasi dan Perlindungan. Mencerminkan komitmen kolektif negara kawasan termasuk AS dan Meksiko untuk melakukan tata kelola migrasi yang lebih manusiawi, tertib, dan aman. Dalam dokumen deklarasi tersebut menyatakan bahwa para kepala negara sepakat untuk bekerja

sama secara regional untuk menangani migrasi, menekankan pentingnya migrasi menjadikan pilihan yang aman, sukarela, dan bermartabat, berkomitmen untuk melindungi HAM semua imigran termasuk pengungsi dan pencari suaka, mendorong pemulangan bukan dengan deportasi melainkan pemulangan yang sukarela dan bermartabat, menekankan terhadap solidaritas, kerja sama internasional, dan tanggung jawab bersama, serta mengakui bahwa imigran memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi-sosial negara tujuan (“Los Angeles Declaration on Migration and Protection | The White House” 2022).

Hal ini sejalan dengan teori yang di nyatakan oleh Snyder bahwa fenomena yang sangat mendasar itu dapat di teliti melalui politik internasional terutama yang berkaitan dengan reaksi, tindakan, ataupun interaksi antarnegara (Snyder, et al. 2002, 55). Interaksi melalui Forum kerjasama *trilateral* dan forum Deklarasi Los Angeles pada tahun 2022 mempengaruhi Joe Biden sebagai aktor dari pembuat keputusan untuk turut berkomitmen terhadap perlindungan HAM. Tujuan ini searah dengan arah kebijakan imigrasi era Joe Biden yang terbuka dan memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka.

Terdapat kesepakatan antara pemerintah AS dan Meksiko terkait kebijakan imigrasi baru menjelang berakhirnya pembatasan pandemi Covid-19 yang menekan arus imigran. Kesepakatan tersebut terkait pemberian dukungan Meksiko untuk AS secara administratif. Presiden Joe Biden merespons arus imigran dengan melakukan pendekatan ganda, yaitu menindak penyebrangan ilegal dan memperluas alternatif legal yang lebih humanis (Colleen Long, Associated Press 2023).

Kerja sama AS-Meksiko menjadi sebuah fondasi yang bernilai penting dalam kebijakan imigrasi era Joe Biden yang berorientasi pada perlindungan. Sesuai dengan teori Snyder yang menyatakan bahwa hubungan luar negeri yang luas dapat meningkatkan pemerintahan pusat (Snyder, et al. 2002, 61). Biden sebagai presiden, menghadapi tantangan pada arus *undocument immigrants* yang masuk melalui perbatasan AS-Meksiko, pada kondisi tersebut menekankan kerja sama dengan Meksiko dalam menekan faktor dari pendorong imigran.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kerangka pemikiran Decision Making Theory yang dicetuskan oleh Richard Snyder dapat memahami dinamika terbentuknya kebijakan imigrasi di era Joe Biden. Pada variabel eksternal dengan indikator *Societies Organized and Functioning as States and Government* ini memiliki korelevanan. Sebuah kebijakan imigrasi yang cenderung keras di bawah kepemimpinan Donald Trump, termasuk kebijakan yang menyebabkan pemisahan keluarga yang berada di perbatasan menyebabkan kritik-kritik tajam dari beberapa negara dan organisasi internasional menciptakan sebuah konteks eksternal yang tidak bisa diabaikan oleh Joe Biden.

Respons dari beberapa organisasi internasional menandakan sinyal negatif terhadap kebijakan era Donald Trump yang telah menyimpang dari nilai HAM. Kebijakan imigrasi represif yang diciptakan oleh Donald Trump telah merusak reputasi AS di mata Internasional, menurut survei *Pew Research Center* Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden selanjutnya telah menyebabkan banyak perubahan yang signifikan pada citra internasional AS, sebelumnya dunia internasional memandang rendah AS dan menentang kebijakan luar negeri AS (Pew Research Center 2021).

Menurut Snyder ketika menganalisis sebuah hubungan antar unit organisasi perlu memperhatikan sebuah *dependence, independence, isolation, and involment*. Selain itu perlu memperhatikan juga durasi unit, dan jenis tujuan (Snyder, et al. 2002, 82-83). Pada analisis ini terlihat Biden sebagai aktor pembuat keputusan memilih pola keterlibatan, keterlibatan tersebut mencerminkan sebuah tujuan yang strategis Biden untuk memulihkan citra AS di mata internasional.

Biden mengambil langkah reformasi yang mempertimbangkan sebuah dampak terhadap hubungan diplomatik. Dengan mengadopsi sebuah kebijakan imigrasi yang lebih humanis untuk menciptakan pemulihan kepercayaan terhadap mitra internasional. Dalam bukunya Snyder menyatakan bahwa presiden lebih berkuasa dalam kebijakan luar negeri, karena presiden memiliki banyak kesempatan untuk melakukan tindakan (Snyder et al. 2002, 31).

Kebijakan imigrasi yang tidak responsif akan menciptakan kerusakan dalam hubungan AS dengan negara-negara lain dan menimbulkan sebuah ketidakstabilan regional, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Joe Biden melakukan langkah konkret untuk merespons sebuah tekanan yang terjadi. Menghentikan kebijakan *Zero Tolerance* dan memberikan kebijakan yang lebih terbuka dalam proses permohonan suaka merupakan langkah Biden untuk menyesuaikan sebuah kebijakan yang sesuai dengan harapan para masyarakat internasional dan nilai-nilai dari kemanusiaan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diproses secara sistematis. Pembentukan kebijakan imigrasi era Joe Biden khususnya pada kasus *undocumented immigrant* di perbatasan AS-Meksiko tahun 2021-2022. Kebijakan tersebut hasil dari sebuah proses melalui kerangka teori *Decision-Making* oleh Richard Snyder, bahwa variabel dari *Internal Setting* memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan imigrasi Joe Biden. Melalui letak geografis yang berdekatan antara AS-Meksiko menjadi jalur utama para imigran, kebutuhan ekonomi domestik setelah Covid-19 mendorong penerimaan tenaga kerja imigran untuk memulihkan, desakan dari masyarakat dan kelompok yang pro terhadap imigran, dan ideologi Partai Demokrat serta karakteristik kepemimpinan Joe Biden menjadi sebuah dasar arah kebijakan yang lebih terbuka dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Faktor dari *Social Structure and Behavior* juga berkontribusi dalam pembentukan kebijakan. Dimana nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat AS khususnya pentingnya mengenai kebebasan dan hak asasi manusia. Proses dari pembentukan opini publik, tekanan dari masyarakat, dan sosialisasi politik memperlihatkan bahwa interaksi sosial yang luas juga dapat mempengaruhi. Dan Faktor dari dinamika eksternal juga menciptakan pengelolaan imigrasi yang lebih efektif seperti pertimbangan terhadap kebutuhan domestik dan imigran, hubungan bilateral dengan Meksiko dan adanya tekanan dari organisasi internasional. Faktor

ini tidak hanya menuntut AS untuk berfokus terhadap domestik saja, akan tetapi membangun kerjasama lintas batas.

Dari proses yang menunjukkan bahwa Joe Biden sebagai *decision maker* sangat berperan untuk menyatukan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kebijakan yang nyata. Tindakan Joe Biden mencerminkan 3 variabel dengan orientasi nilai, tekanan global dan kepentingan politi AS. Sehingga terwujudnya sebuah respon atau aksi Joe Biden dengan mewujudnya faktor-faktor yang menuntut seperti terbentuknya kebijakan imigrasi yang lebih humanis, inklusif, dan kolaboratif. Secara keseluruhan, bahwa penelitian ini menyimpulkan terbentuknya kebijakan imigrasi di era Joe Biden merupakan hasil dari interaksi yang saling berkaitan antar Faktor internal, *Social Structure and Behavior*, dan faktor eksternal. Kebijakan yang dihasilkan oleh Biden mengarah pada pendekatan yang kolaboratif dan humanis.

4.2 Rekomendasi

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini hanya sebatas mengenai faktor terjadinya kebijakan imigrasi era Joe Biden tahun 2021-2022 berdasarkan hasil penelitian yang telah disediakan dari bab I hingga bab III. untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberikan rekomendasi untuk memperluas analisis terhadap kebijakan imigrasi AS. Mengingat dinamika kebijakan imigrasi AS selalu bergerak setiap tahunnya, dan dipengaruhi oleh dinamika politik domestik. Untuk penelitian selanjutnya peneliti merekomendasikan untuk mengangkat kajian yang berfokus pada arah kebijakan imigrasi AS setelah masa kepemimpinan AS, terutama terhadap kepemimpinan presiden terbarunya yaitu Donald Trump. Hal tersebut

mungkin akan menggambarkan arah kebijakan imigrasi terbaru. Apakah selaras dengan arah kebijakan Joe Biden, atau malah terjadi reaksi yang konservatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsley, Julia. 2022. "Migrant Border Crossings in Fiscal Year 2022 Topped 2.76 Million, Breaking Previous Record." *NBC News*. <https://www.nbcnews.com/politics/immigration/migrant-border-crossings-fiscal-year-2022-topped-276-million-breaking-rcna53517>.
- Al-Najjar, Sherzad Ahmed Ameen, and Sartip Khalis Husien. 2022. "Richard Snyder's Approach for Analyzing Decision-Making Process." *Journal of Political and Security Studies*, 190–217.
- Alvarez, Priscillia, and Evan Perez. 2021. *CNN Politics*. 26 Januari. Accessed September 11, 2025. <https://edition.cnn.com/2021/01/26/politics/zero-tolerance-immigration-justice/index.html>
- American Immigration Council. 2024. "Biden Expands Immigration Protections to Undocumented Spouses and Streamlines Employment-Based Visas for DACA Recipients." <https://www.americanimmigrationcouncil.org/news/biden-protections-undocumented-spouses-daca-recipients>.
- American Immigration Council. 2024. "End of Year Report 2024." *American Immigration Council*. https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/research/american_immigration_council_2024_impact_report.pdf.
- American Immigration Lawyers Association. 2024. *Policy Brief on Immigration Enforcement*. Washington, DC: AILA. <https://assets.aila.org/files/b421c935-25b6-4a93-ab76-ad82ae4f2591/21012135.pdf?1697590280>.
- Andani, Tiya. 2019. "Alasan Pemerintah Amerika Serikat Donald Trump Menerapkan Kebijakan Kontroversial Terhadap Meksiko Melalui Pembangunan Tembok dan Pembatasan Imigran Ilegal (2016–2020)." *Repository.umy.ac.id*. <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29953>.
- Antara. 2017. "Jaksa Agung dari 16 Negara Bagian AS Kecam 'Muslim Ban'

- Trump.” *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/609624/jaksa-agung-dari-16-negara-bagian-as-kecam-muslim-ban-trump>.
- Arbar, Thea Fathanah. 2025. “7 Fakta Kebijakan Imigrasi Trump, Darurat Nasional-Deportasi Massal.” *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250121084908-4-604696/7-fakta-kebijakan-imigrasi-trump-darurat-nasional-deportasi-massal>.
- Associated Press. 2022. “Biden Administration Ends Trump-Era 'Remain in Mexico' Policy.” *PBS: Public Broadcasting Service*. <https://www.pbs.org/newshour/politics/biden-administration-ends-trump-era-remain-in-mexico-policy>.
- Associated Press. 2024. “Meski Akui Kontribusi Imigran Pada Perekonomian, Banyak Warga Amerika Khawatir Risikonya.” *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/meski-akui-kontribusi-imigran-pada-perekonomian-banyak-warga-amerika-khawatir-risikonya/7548597.html>.
- Atwood, Kylie. 2021. “US Diplomats Draft Memo Calling on Pompeo to Denounce Trump.” *CNN Politics*. <https://edition.cnn.com/2021/01/08/politics/state-department-dissent-memo-trump-insurrection/index.html>.
- Azon Global. 2023. “The Number of Immigrants from Mexico to the US in 2023 Has Exceeded 2.2 Million.” *Azon Global*. <https://azon.global/en/posts/International-Life/the-number-of-immigrants-from-mexico-to-the-us-in-2023-has-exceeded-22-million-242>.
- Az-Zahra, Rihhadatul A. n.d. “Analisis Ideosinkratik Joe Biden Terkait Penangguhan Kebijakan AS 'Zero Tolerance'.” *Journal of Integrative International Relations* 9 (1): 45–59. Accessed February 9, 2025. <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/JIIR/article/view/561/443>.
- Baxter, J., and Andy Cerda. 2022. “Where Republicans, Democrats Differ on Immigration Policy Priorities.” *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/09/08/republicans-and-democrats-have-different-top-priorities-for-u-s-immigration-policy/>.
- BBC News Indonesia. 2019. “Berkunjung ke Perbatasan AS-Meksiko, Trump Perkeras Ancaman soal Tembok.” *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46834768>.
- BBC. 2020. “Dampak Kebijakan Imigrasi Trump: Orang Tua 545 Anak Migran yang Terpisah Belum Ditemukan.” *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54655826>.
- Beltran, Sergio M. 2024. “Pushed by Public Opinion Shift, Democrats Adopt Immigration Restrictions.” *NPR - Breaking News*.

<https://www.npr.org/2024/10/29/nx-s1-5171441/democrats-shift-immigration>.

Bier, David J. 2021. "Biden's Border Policy Is Not 'Open Borders'." *United States of America*. <https://policycommons.net/artifacts/1818362/bidens-border-policy-is-not-open-borders/2555823/>.

"Biden Administration Reverses Trump Administration Policies on Immigration and Asylum." 2021. *Journal of International Law* 115 (2): 340–347.

Carnegie Corporation of New York. 2023. "What Does the End of Title 42 Mean for U.S. Migration Policy?" <https://www.carnegie.org/our-work/article/what-does-end-title-42-mean-us-migration-policy/>.

Center for Migration Studies. 2021. "President Biden's Executive Actions on Immigration." <https://cmsny.org/biden-harris-immigration-executive-actions/>.

Colleen Long, Associated Press. 2023. "U.S. and Mexico Officials Agree on Tighter Immigration Policies at Border." May 3. Accessed July 11, 2025. <https://apnews.com/article/us-mexico-immigration-policy-border-2023>.

Dagun, Save M. 2000. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. N.p.: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

Democratic National Committee. 2020. *2020 Democratic Party Platform*. Washington, DC. <https://democrats.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/2020-Democratic-Party-Platform.pdf>.

Dewan, Angela, and Luke McGee. 2021. "Biden Says 'America Is Back,' but 'America First' Has Haunted His First 100 Days." *CNN*. <https://edition.cnn.com/2021/04/28/world/biden-100-days-foreign-policy-intl/index.html>.

Dewi, Karina U., and Desti P. Cahyani. 2020. "The United States' Zero Tolerance Immigration Policy: An Analysis of Structural Violence." *Journal Global Strategis* 14 (1, Juni): 31–44.

Drew, Kate. 2017. "This Is What Trump's Border Wall Could Cost." *CNBC.com*. <https://www.cnbc.com/2015/10/09/this-is-what-trumps-border-wall-could-cost-us.html>.

Figueroa, Lorena. 2024. *The Guardi*. 12 Juni. Accessed September 10, 2025. <https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jun/12/biden-border-executive-order-climate-risks?>

Galvez, Camilo M. 2024. "Illegal Crossings at the U.S. Southern Border Reach the Lowest Point of Biden Presidency." *CBS News*.

<https://www.cbsnews.com/news/u-s-mexico-border-migrant-crossings-reach-new-biden-era-low/>.

sugiatiGramlich, John. 2020. "Border Apprehensions, ICE Arrests and Deportations under Trump." *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2020/03/02/how-border-apprehensions-ice-arrests-and-deportations-have-changed-under-trump/>.

Gramlich, John. 2022. "Key Facts about Title 42, the Pandemic Policy That Has Reshaped Immigration Enforcement at U.S.-Mexico Border." *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/04/27/key-facts-about-title-42-the-pandemic-policy-that-has-reshaped-immigration-enforcement-at-u-s-mexico-border/>.

Guerra, Luis. 2022. "Supreme Court Holds That Biden Administration's Termination of the Migrant Protection Protocols Did Not Violate the Immigration and Nationality Act." *Main Clinic Navigation*. <https://www.cliniclegal.org/resources/litigation/supreme-court-holds-biden-administrations-termination-migrant-protection>.

Gonzalez, Ana, and Jens M. Krogstad. 2019. "Illegal Immigration from Mexico: What We Know." *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/06/28/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/>.

Hartanto, Aprilliana L., Yusran, and Syahrul Awal. 2022. "Kebijakan Presiden Donald Trump dalam Program Pembangunan Tembok Pembatas Sebagai Upaya Mencegah *Illegal Immigrant & Narcotics Smuggling* Asal Meksiko (2017–2020)." *Jurnal Fisip Budi Luhur* 6 (2, December): 135.

Hiebert, Daniel, Muzaffar Chishti, Kathleen Bush, Colleen Putzel, and Madeleine Greene. 2024. "Biden's Mixed Immigration Legacy." *Migration Policy Institute*. <https://www.migrationpolicy.org/article/biden-immigration-legacy>.

Homeland Security. 2019. *2017 Yearbook of Immigration Statistics*. Washington, DC: U.S. Department of Homeland Security. https://ohss.dhs.gov/sites/default/files/2023-12/yearbook_immigration_statistics_2017_0.pdf.

Hook, Jennifer V., Ariel G. Soto, and Julia Gelatt. 2025. "The Unauthorized Immigrant Population Expands amid Record U.S.-Mexico Border Arrivals." *Migration Policy Institute*. <https://www.migrationpolicy.org/news/unauthorized-immigrant-population-mid-2023>.

Human Rights Watch. 2020. *World Report 2020: United States Chapter*. New York: Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/united-states>.

- Human Rights Watch. 2022. “‘Remain in Mexico’: Overview and Resources.” *Human Rights Watch*, February 7, 2022. <https://www.hrw.org/news/2022/02/07/remain-mexico-overview-and-resources>.
- Idhom, Addid M. 2017. “Iran Balas Diskriminasi Keimigrasian Donald Trump.” *Tirto.id*. https://tirto.id/iran-balas-diskriminasi-keimigrasian-donald-trump-cijE#google_vignette.
- IOM UN Migration. 2021. “IOM Welcomes President Joe Biden’s Executive Actions on Migration.” February 4. Accessed July 11, 2025. <https://www.iom.int/news/iom-welcomes-president-joe-bidens-executive-actions-migration>.
- IOM UN Migration. 2021. *IOM Welcomes President Joe Biden’s Executive Actions on Migration*. February 4. Accessed July 11, 2025. <https://www.iom.int/news/iom-welcomes-president-joe-bidens-executive-actions-migration>.
- Joint Economic Committee. 2024. *Immigrants Are Vital to the US Economy*. Washington, DC: U.S. Government. <https://www.jec.senate.gov>.
- “Joint Statement: United States, Guatemala, and Mexico Chart New Path for Hemispheric Migration Partnership at Trilateral Ministerial Meeting.” 2024. *Homeland Security*. <https://www.dhs.gov/archive/news/2024/02/28/joint-statement-united-states-guatemala-and-mexico-chart-new-path-hemispheri>.
- Kandel, William A. 2018. “The Trump Administration's 'Zero Tolerance' Immigration Enforcement Policy.” *Congressional Research Service*, June, 1–24.
- Khaeruddin. 2023. “Analisis Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat: Studi Kebijakan Imigran pada Masa Pemerintahan Donald Trump (2017–2021).” *Keraton: Journal of History Education and Culture* 5 (1, June): 23–32.
- Kinasih, Sekar. 2021. “Upaya Biden Membalik Kebijakan Trump & Pasang Surut Imigrasi AS.” *Tirto.id*. <https://tirto.id/upaya-biden-membalik-kebijakan-trump-pasang-surut-imigrasi-as-gaPd>.
- Kopan, Tal, and Catherine E. Shoichet. 2017. “Key Points in Trump’s Immigration Executive Orders.” *CNN Politics*. <https://edition.cnn.com/2017/01/25/politics/donald-trump-immigration-executive-orders/index.html>.
- Korhonen, Veera. 2024. “Number of Mexican Immigrants in the U.S. 2023.” *Statista*. <https://www.statista.com/statistics/673350/mexican-immigrants-in-the-united-states/>.

- Krogstad, Jens M., and Ana G. Barrera. 2022. "Key Facts about U.S. Immigration Policies and Biden's Proposed Changes." *Pew Research Center*, January 11. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/01/11/key-facts-about-u-s-immigration-policies-and-bidens-proposed-changes/>.
- Kusnady, and Felicia Audry. 2020. "Diplomasi Amerika Serikat Terhadap Meksiko Dalam Menangani Isu Imigrasi di Perbatasan Era Presiden Trump." April.
- IOM UN Migration. 2021. *IOM Welcomes President Joe Biden's Executive Actions on Migration*. 04 February. Accessed Juli 11, 2025. <https://www.iom.int/news/iom-welcomes-president-joe-bidens-executive-actions-migration>.
- Liptak, Kevin. 2022. *CNN Politics*. 28 Juni. Accessed September 10, 2025. <https://edition.cnn.com/2022/06/28/politics/joe-biden-san-antonio-deaths/>
- Mazrieva, Eva. 2018. "Ribuan Warga AS Protes Kebijakan Imigrasi 'Zero Tolerance'." *Voice of America News*. <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-warga-as-protes-kebijakan-imigrasi-zero-tolerance-/4461979.html>.
- Mexico Daily Post. 2024. "Mexican Immigrants in the United States." *Mexico Daily Post*. <https://mexicodailypost.news/2024/10/13/mexican-immigrants-in-the-united-states/>.
- Monalisa. 2017. "Jaksa Agung dari 16 Negara Bagian AS Kecam 'Muslim Ban' Trump." *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/609624/jaksa-agung-dari-16-negara-bagian-as-kecam-muslim-ban-trump>.
- Muslimin, Maulida Z., and Agussalim Burhanuddin. 2024. "Analisis Kebijakan Pemerintahan Donald Trump terhadap Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko dalam Perspektif Keamanan Nasional." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Politik Interdisiplin* 11 (1, Juni): 737–744.
- Nainggolan, Poltak P. 2010. "Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan." *Kajian* 15 (1): 111–140.
- Newsweek. 2025. "Map Shows ICE Arrests by Country of Citizenship." *Newsweek*. <https://www.newsweek.com/map-shows-ice-arrests-country-immigration-2025127>.
- Office of Homeland Security Statistics. 2023. *2022 Yearbook of Immigration Statistics*. Washington, DC: Department of Homeland Security.
- Office of Homeland Security Statistics. 2024. *2023 Yearbook of Immigration Statistics*. Washington, DC: Department of Homeland Security.
- Office of Immigration Statistics. 2019. *2018 Yearbook of Immigration Statistics*. Washington, DC: Department of Homeland Security.
- Office of Immigration Statistics. 2020. *2019 Yearbook of Immigration Statistics*. Washington, DC: Department of Homeland Security.

- Office of Immigration Statistics. 2022. *2020 Yearbook of Immigration Statistics*. Washington, DC: Department of Homeland Security.
- Office of Immigration Statistics. 2022. *2021 Yearbook of Immigration Statistics*. Washington, DC: Department of Homeland Security.
- Orches, Diana. 2021. *PRRI*. 1 April. Accessed September 11, 2025. <https://prri.org/spotlight/perceptions-of-cultural-threat-and-discrimination-are-related-to-support-for-bidens-immigration-agenda/>
- Padmi, Made F., and Zaenab Yulianti. 2021. “Kebijakan Imigrasi Presiden Trump Terhadap Masyarakat Imigran di Amerika Serikat Tahun 2017–2018.” *Global Insight Journal* 6 (2, April–September).
- Parker, Alison L. n.d. ““Remain in Mexico.”” *Human Rights Watch*. Accessed February 19, 2025. <https://www.hrw.org/tag/remain-mexico>.
- Passel, Jeffrey S., and Jens M. Krogstad. 2023. “What We Know about Unauthorized Immigrants Living in the U.S.” *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/11/16/what-we-know-about-unauthorized-immigrants-living-in-the-us/>.
- Pew Research Center. 2018. “Trump Gets Negative Ratings for Many Personal Traits, but Most Say He Stands Up for His Beliefs.” *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/politics/2018/10/01/trump-gets-negative-ratings-for-many-personal-traits-but-most-say-he-stands-up-for-his-beliefs/>.
- Pew Research Center. 2021. *America’s Image Abroad Rebounds with Transition from Trump to Biden*. June 10, 2021. <https://www.pewresearch.org/global/2021/06/10/americas-image-abroad-rebounds-with-transition-from-trump-to-biden/>.
- Pew Research Center. 2024. “How Americans View the Situation at the U.S.-Mexico Border, Its Causes and Consequences (80% Say the U.S. Government Is Doing a Bad Job Handling the Migrant Influx).” *Pew Research Center*. https://www.pewresearch.org/politics/wp-content/uploads/sites/4/2024/02/PP_2024.2.15_US-Mexico-border_REPORT.pdf.
- Pillai, Drishti, and Samantha Artiga. 2024. “Expected Immigration Policies Under a Second Trump Administration and Their Health and Economic Implications.” *KFF*. <https://www.kff.org/racial-equity-and-health-policy/issue-brief/expected-immigration-policies-under-a-second-trump-administration-and-their-health-and-economic-implications/>.
- Pujiyanti, Adirini. 2017. “Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump.” *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, Februari 2017.

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-1-I-P3DI-Februari-2017-179.pdf.

- Quinn, Melissa. 2020. *CBS News*. 23 Oktober. Accessed September 11, 2025. <https://www.wbtv.com/2020/10/22/biden-says-family-separations-violated-every-notion-who-we-are-nation-2/>
- Rachman, Muhammad A. 2018. "Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4 (2): 229.
- Ramadhani, Putri, Apriwan, and Virtuous Setyaka. 2023. "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko." *Jurnal Palito FISIP Unand* 2 (2): 39–53.
- Reporter Satu Harapan. 2018. "PBB: Kebijakan Imigrasi Trump Melanggar HAM." *Satu Harapan*. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/pbb-kebijakan-imigrasi-trump-melanggar-ham>.
- Republika. 2021. "Meksiko dan Amerika Serikat Sepakat Bendung Lonjakan Imigran." *Republika*. <https://internasional.republika.co.id/berita/qggmxg382/meksiko-dan-amerika-serikat-sepakat-bendung-lonjakan-imigran-part2>.
- Robertson, Stave. 2010. *Proceedings of the 76th Annual National Convention of The American Legion*. N.p.: University of Pennsylvania.
- Rosanda, Nabilla. 2021. "Polemik Perbatasan Amerika Serikat–Meksiko dan Pelanggaran Hak Imigran Anak atas Kebijakan 'Zero Tolerance' oleh Donald Trump." *ResearchGate*, Desember.
- Rosenbloom, Raquel, and Jeanne Batalova. 2022. "Mexican Immigrants in the United States." *Migration Policy Institute*. <https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states-2021>.
- Ruiz Soto, Ariel G., Doris Meissner, and Andrew Selee. 2025. *Facing New Migration Realities: U.S-Mexico Relations and Shared Interests*. Washington, DC: Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi_us-mexico-relations-migration-2025-final.pdf.
- Rukminingsih, Gunawan Adnan, and Mohammad A. Latief. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*. N.p.: Erhaka Utama.
- Saputra, Bayu. 2022. "Analisis Pengaruh Partai Republik Terhadap Kebijakan Luar Negeri 'Trump Wall' di Perbatasan AS–Meksiko." *Jurnal Syiar: Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional* 2 (1, Januari): 116–131.

- Schumacher, Shannon, Liz Hamel, Samantha Artiga, Drishti Pillai, Ashley Kirzinger, Audrey Kearney, Marley Presiado, Ana Gonzalez-Barrera, and Mollyann Brodie. 2023. "Understanding the U.S. Immigrant Experience: The 2023 KFF/LA Times Survey of Immigrants." *KFF*. <https://www.kff.org/report-section/understanding-the-u-s-immigrant-experience-the-2023-kff-la-times-survey-of-immigrants-findings/>.
- Schmidt, Paul Wickham. 2019. "An Overview and Critique of US Immigration and Asylum Policies in the Trump Era." *Journal on Migration and Human Security* 92-102.
- Scott, Carl Eric. 2014. *National Affairs*. Accessed September 11, 2025. <https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-five-conceptions-of-american-liberty?>
- Setiady, Monica A., and Muharjono. 2024. "Responsibility to Protect in United States Policy Towards Immigrants in the President Joe Biden." *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan* 162 (Juli). <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/viewFile/12618/6595>.
- Setiawan, Asep, and Endang Sulastri. 2017. *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UMJ Press, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Share America. 2021. "Biden Sets a Path to a New Immigration System That Is 'Just, Safe, and Regular'." *ShareAmerica*, February 16, 2021. <https://archive-share.america.gov/id/biden-tetapkan-jalur-untuk-sistem-imigrasi-baru-yang-adil-aman-dan-teratur/>.
- Silverman, Ellie. 2021. "Protesters Press Congress for Path to Citizenship as Democrats' Plan Hits Obstacle." *The Washington Post* (Washington), September 21, 2021. <https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2021/09/21/dc-immigration-reform-protests-capitol/>.
- Sitepu, P. A. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. N.p.: Graha Ilmu.
- Snyder, Richard C., H. W. Bruck, Burton M. Sapin, Valerie M. Hudson, Derek H. Chollet, and James M. Goldgeir. 2002. *Foreign Policy Decision-Making Revisited*. New York: Palgrave Macmillan.
- Snyder, Richard C., H. W. Bruck, Burton Sapin, and Valerie Hudson. 2002. *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*. Edited by Richard C. Snyder. N.p.: Palgrave Macmillan.
- Soto, Ariel G. 2022. "Record-Breaking Migrant Encounters at the U.S.-Mexico Border Overlook the Bigger Story." *Migration Policy Institute (MPI)*. <https://www.migrationpolicy.org/news/2022-record-migrant-encounters-us-mexico-border>.

- Steiner, Miriam. 1997. "The Elusive Essence of Decision: A Critical Comparison of Allison's and Snyder's Decision-Making Approaches." *International Studies Quarterly* 41 (3): 389–422.
- Sugiati, Cristy. 2022. "Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Imigran Ilegal dalam Isu Perbatasan pada Tahun 2017–2019." *Global Insight Journal* 7 (2, April–September): 162.
- Sugiati, Cristy. 2022. "Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Imigran Ilegal Meksiko dalam Isu Perbatasan pada Tahun 2017–2019." *Global Insight Journal* 7 (2, April–September).
- Syamsi, Ibnu. 1995. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. N.p.: Bumi Aksara.
- Taufik, and Sundari A. Pratiwi. 2021. "American First: Kebijakan Donald Trump dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat." *Journal of International Studies* 6 (1, November): 221–241.
- Taufik, and Sundari A. Pratiwi. 2021. "American First: Kebijakan Donald Trump dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat." *Journal of International Studies* 6 (1, November): 221–241.
- Tempo.co. 2024. "Biden Janjikan Kewarganegaraan bagi 500.000 Imigran yang Menikah dengan Warga Negara AS." *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/internasional/biden-janjikan-kewarganegaraan-bagi-500-000-imigran-yang-menikah-dengan-warga-negara-as-48049>.
- The Obama Foundation. 2022. *Ten Years of DACA*. Accessed June 30, 2025. <https://www.obama.org/stories/daca-10-years/>.
- The White House. 2022. "Los Angeles Declaration on Migration and Protection." *Biden White House*. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/10/los-angeles-declaration-on-migration-and-protection/>.
- The White House. 2024. "Fact Sheet: President Biden Announces New Action to Keep Families Together." *The White House*. Accessed December 5, 2024. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2024/06/18/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-keep-families-together/>.
- The White House. 2023. *The White House*. 05 Januari. Accessed September 10, 2025. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/01/05/remarks-by-president-biden-on-border-security-and-enforcement/>.
- Triputri, Adwiyati. 2016. "Efektivitas Twenty First Century Border Management Amerika Serikat-Meksiko dalam Penanggulangan Arus Imigran Ilegal." *Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin*.

- Trump White House Archives. 2017. "Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States – The White House." <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states-2/>.
- U.S. Department of Homeland Security, Office of Inspector General. 2019. *Management Alert – DHS Needs to Address Dangerous Overcrowding Among Single Adults at El Paso Del Norte Processing Center*. OIG-19-46, May 30, 2019. <https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/Mga/2019/oig-19-46-may19-mgmtalert.pdf>.
- UN Nations. 2021. *UN Welcomes Biden Administration Commitment to Refugee Protection*. January 20. Accessed July 11, 2025. <https://news.un.org/en/story/2021/01/1082372>.
- UN Nations. 2021. *UN welcomes Biden administration commitment to refugee protection*. 20 January. Accessed Juli 11, 2025. UN welcomes Biden administration commitment to refugee protection.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2018. *Environmental Performance Reviews: Third Review. Bosnia and Herzegovina*. N.p.: UN.
- United Nations, ed. 2020. *Global Study on Smuggling of Migrants 2018*. N.p.: UN. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf.
- USCIS Guide. 2025. "Affirmative Asylum vs. Defensive Asylum." July 6, 2025. <https://www.uscisguide.com/visa/immigrant-visas/affirmative-asylum-vs-defensive-asylum/>.
- Vargas, Camilo. 2014. "Coyotes: The Smugglers That Bring Kids To The Border." *Latino USA*. <https://www.latinousa.org/2014/09/12/smugglers/>.
- Verea, Mónica. 2022. "La política migratoria de Biden a un año de su administración." *Norteamérica* 17 (1, January–June): 265–291. <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2022.1.562>.
- VOA Indonesia. 2017. "Pengungsi dalam Kesepakatan AS-Australia, akan Jalani Pemeriksaan Ketat." *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/pengungsi-dalam-kesepakatan-as-australia-akan-jalani-pemeriksaan-ketat/3701695.html>.
- VOA. 2020. "Biden Diharapkan Ubah Arah Kebijakan Utama Imigrasi." *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/biden-diharapkan-ubah-arah-kebijakan-utama-imigrasi/5702853.html>.
- Voice of America. n.d. "Amnesty International Tentang Kebijakan Imigrasi AS." *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/4610681.html>.

- Wardhani, Indah K., and Irawati. 2019. "Tinjauan Kebijakan Amerika Serikat tentang Larangan Masuk Terhadap Pengungsi Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 5 (1).
- We Are Home. 2021. "Leading Organizations Join Forces, Launch Nationwide Campaign for Immigrant Justice." *We Are Home*, January 25, 2021. <https://www.wearehome.us/news/leading-organizations-join-forces-launch-nationwide-campaign-for-immigrant-justice>.
- White House. 2017. "Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States." *White House Archives*. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-enhancing-public-safety-interior-united-states/>.
- Wolf, Zachary B. 2019. "Yes, Obama Deported More People Than Trump but Context Is Everything." *CNN Politics*. <https://edition.cnn.com/2019/07/13/politics/obama-trump-deportations-illegal-immigration/index.html>.
- Yani, Yanyan M. 2008. "Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis 1." *Journal Padjadjaran University*, 1–16.
- Yayboke, Erol, Catherine Nzuki, and Maxwell Myers. 2021. *The Center for Strategic and International Studies*. 12 Agustus. Accessed September 11, 2025. <https://www.csis.org/analysis/biden-harris-strategy-root-causes-migration-and-fragility-central-america>?
- Yuliantoro, Nur R., Atin Prabandari, and Dafri Agus Salim. 2016. "Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat." *Jurnal Hubungan Internasional* 52 (October)
- Zuraya, Nidia. 2017. "900 Pejabat Kemenlu AS Kirim Nota Keberatan kepada Trump." *Republika*. <https://internasional.republika.co.id/berita/okny3c383/900-pejabat-kemenlu-as-kirim-nota-keberatan-kepada-trump>.